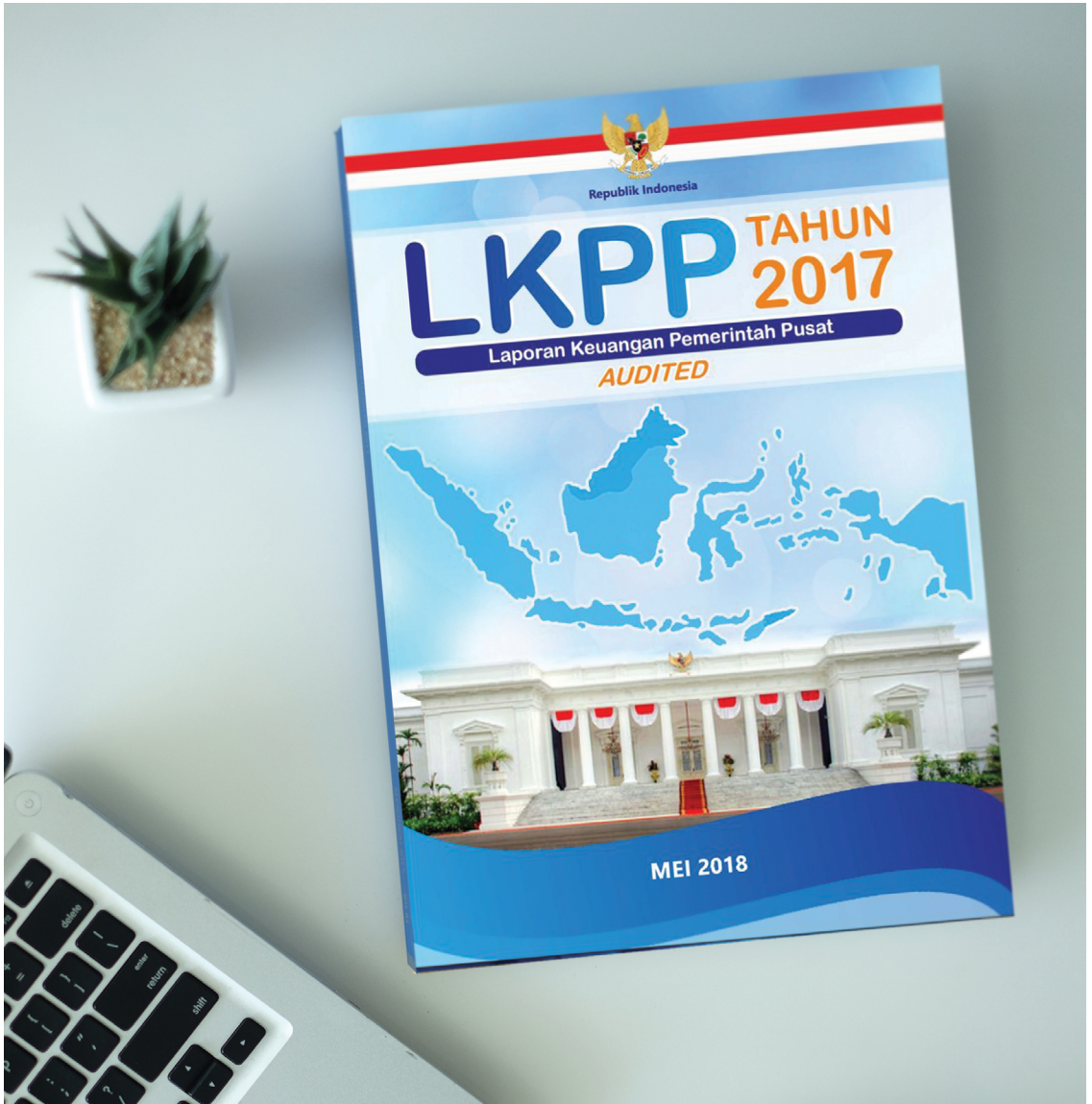




APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



LKPP Akuntabel APBN Kredibel



“LKPP yang telah diperiksa oleh BPK sebelum menjadi UU, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK memberikan opini WTP atas LKPP 2017. Hal ini artinya pemerintah berhasil mempertahankan yang pertama kali diberikan BPK 2016,”

Disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat Paripurna DPR 3 Juli 2018.



Realisasi Pendapatan Negara

Angka realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah hingga 30 Juni 2018 atau sampai dengan akhir Semester I tahun 2018 mencapai Rp833,45 triliun, atau telah mencapai 44,00 persen dari target APBN tahun



Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2018 mencapai sebesar Rp944,01 triliun, atau sekitar 42,51 persen dari pagu, meningkat 5,67 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi



Perkembangan Penerimaan Perpajakan

Rincian realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2018 yaitu penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp581,54 triliun dan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp71,95 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut telah mencapai 40,84 persen dari target penerimaan pada APBN 2018.



Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sampai dengan 30 Juni 2018 mencapai Rp176,83 triliun (64,20 persen dari target APBN 2018) atau tumbuh sebesar 21,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.



Realisasi Bea dan Cukai

Realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai telah mencapai 37,07 persen dari target pada APBN tahun 2018. Realisasi tersebut hingga akhir Juni terus tumbuh mencapai 16,66 persen (yoy)



Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juni 2018 telah mencapai Rp385,57 triliun atau 50,33 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp349,71 triliun dan Dana Desa Rp35,86 triliun.



Laju Inflasi

Laju inflasi bulan Januari s.d. Juni 2018 tercatat sebesar 1,90 persen (ytd) atau 3,12 persen (yoy),



Harga ICP

Rata-rata ICP Semester I tahun 2018 tercatat sebesar USD 66,6 per barel. Hingga akhir Semester I tahun 2018 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS tercatat sebesar Rp13.746/USD.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja perekonomian tahun 2018 diperkirakan masih akan didukung oleh kinerja investasi yang tumbuh cukup kuat seiring keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tumbuh lebih baik sejalan dengan terjaganya tingkat harga, terutama harga kebutuhan pokok. Faktor kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan Amerika Serikat (AS) serta ketegangan kawasan menciptakan risiko ketidakpastian global dan menimbulkan gejolak di banyak negara. Perkembangan tersebut masih akan menjadi risiko dan tantangan yang harus dihadapi ke depan. Dalam jangka menengah, Pemerintah fokus pada stabilisasi perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, laju inflasi yang rendah, mengendalikan defisit fiskal pada tingkat yang sehat serta menjaga defisit transaksi berjalan pada level yang aman. Pemerintah juga mendorong penguatan posisi fiskal dan kesehatan APBN sehingga memiliki ruang gerak fiskal yang memadai serta memperbaiki posisi keseimbangan primer.

Angka realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah hingga 30 Juni 2018 atau sampai dengan akhir Semester I tahun 2018 mencapai Rp833,45 triliun, atau telah mencapai 44,00 persen dari target APBN tahun 2018. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Juni 2018 terkumpul sebesar Rp653,49 triliun, PNBP sebesar Rp176,83 triliun, dan hibah sebesar Rp3,12 triliun atau masing-masing telah mencapai 40,39 persen, 64,20 persen, dan 260,70 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2018. Pertumbuhan realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP, secara *year-on-year* (yoy), hingga akhir semester I 2018 berturut-turut adalah 14,26 persen dan 21,02 persen.

Rincian realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2018 yaitu penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp581,54 triliun dan penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp71,95 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut telah mencapai 40,84 persen dari target penerimaan pada APBN 2018. Selain itu, realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai telah mencapai 37,07 persen dari target pada APBN tahun 2018. Hingga akhir

Semester I tahun 2018, realisasi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 13,99 persen (yoy), didukung oleh kinerja positif seluruh jenis penerimaan pajak yang terdiri dari PPh nonmigas, PPh migas, dan PPN. Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai juga masih terus tumbuh hingga akhir Juni 2018 mencapai 16,66 persen (yoy). Tren pertumbuhan positif kinerja penerimaan tersebut berasal dari semua komponen penerimaan kepabeanan dan cukai seperti bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Penerimaan PPh nonmigas sampai dengan akhir Juni 2018 tumbuh 14,85 persen (yoy), bila tidak memperhitungkan penerimaan dari TA, maka PPh non migas dapat tumbuh mencapai 19,86 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan PPh non migas masih didominasi oleh penerimaan PPh 22 Impor, PPh pasal 25/29 Badan, dan PPh pasal 21, ketiganya masing-masing tumbuh mencapai 28,00 persen (yoy), 23,81 persen (yoy), dan 22,26 persen (yoy). Penerimaan PPh migas hingga akhir Juni 2018 mampu tumbuh positif yaitu sebesar 9,13 persen (yoy) dan telah mencapai 78,84 persen terhadap target yang ditetapkan pada APBN 2018. Pertumbuhan penerimaan PPh migas ditopang oleh meningkatnya

harga komoditas yang mampu mendorong kenaikan harga *Indonesia Crude Oil Price* (ICP). Dibanding tahun 2017, pertumbuhan PPh migas mengalami pertumbuhan negatif, meskipun kenaikan ICP sebagai faktor penyumbang kenaikan PPh migas cukup signifikan. Meskipun pertumbuhannya negatif namun secara nominal PPh migas di tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun 2017

Sementara itu, untuk penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir Juni 2018, tumbuh mencapai 13,63 persen (yoy) didorong oleh pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Sementara itu penerimaan PPnBM DN hingga akhir Juni 2018 tumbuh negatif 14,16 persen (yoy), sebagai akibat tagihan restitusi yang cukup signifikan.

Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Juni 2018 berasal dari komponen penerimaan cukai yang terus tumbuh mencapai 15,02 persen (yoy), penerimaan bea masuk tumbuh 12,98 persen (yoy), dan pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen penerimaan bea keluar yang mencapai 93,75 persen (yoy). Pertumbuhan positif penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Semester I tahun 2018 merupakan pertumbuhan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Aktivitas perdagangan internasional

yang membaik dan dampak positif implementasi kebijakan kepabeanan dan cukai dalam penertiban kegiatan impor dan cukai berisiko tinggi (PIBT dan PCBT) merupakan faktor yang menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan penerimaan. Secara lebih rinci, pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Juni 2018 masih didominasi oleh pertumbuhan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang mencapai 14,84 persen (yoy). Kinerja penerimaan CHT didorong oleh efek peningkatan tarif tertimbang efektif yang lebih tinggi dari kenaikan tarif rata-rata tahun 2018 dan adanya kenaikan produksi hasil tembakau di seluruh golongan, karena keberhasilan program PCBT. Sementara itu, penerimaan BM hingga akhir Juni 2018 tercatat merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir, didukung oleh peningkatan impor sebagai efek Hari Raya Idul Fitri, serta pertumbuhan devisa impor (8,35 persen yoy), yang berasal dari impor Bahan Baku/Barang Penolong dan Barang Modal. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 7,05 persen (yoy) terhadap pertumbuhan devisa impor, hal ini mengindikasikan bergeraknya aktivitas produksi dalam negeri. Penerimaan BK hingga akhir Juni 2018 menunjukkan kinerja yang dikontribusikan oleh aktivitas ekspor komoditas mineral yang tumbuh signifikan akibat pengaruh tren membaiknya harga komoditas di pasar internasional dan meningkatnya permintaan

dari negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia. Ekspor komoditas mineral tercatat tumbuh sebesar 181,46 persen (yoy).

PNBP sampai dengan 30 Juni 2018 mencapai Rp176,83 triliun (64,20 persen dari target APBN 2018) atau tumbuh sebesar 21,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Peningkatan harga komoditas masih menjadi faktor utama meningkatnya PNBP di sektor SDA. Peningkatan harga ICP pada bulan Juni 2018 yang tercatat sebesar USD 70,6 per barel mendorong tumbuhnya capaian penerimaan SDA migas pada bulan Juni 2018 sebesar 47,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Selain meningkatnya harga ICP, peningkatan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Juni 2018 menjadi sebesar USD 96,61 per ton dari USD 86,53 per ton pada bulan Mei 2018 mendorong tumbuhnya penerimaan SDA nonmigas sebesar 29,09 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2017. Peningkatan PNBP selain dari sektor SDA juga mengalami peningkatan. Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN) pada bulan Juni 2018 mencapai 79,48 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh sebesar 12,95 persen (yoy). Sektor perbankan masih merupakan kontributor terbesar atas peningkatan penerimaan dividen BUMN tersebut. Untuk

PNBP Lainnya telah mencapai 54,30 persen dari target APBN tahun 2018 dan penerimaan utama bersumber dari (1) Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha, (2) Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, (3) Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan, serta (4) Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai 47,85 persen dari target APBN tahun 2018 yang bersumber terutama dari Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2018 mencapai sebesar Rp944,01 triliun, atau sekitar 42,51 persen dari pagu, meningkat 5,67 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp558,44 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp385,57 triliun. Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Upaya perbaikan tersebut tercermin antara lain dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir



Semester I tahun 2018 yang tumbuh 12,01 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi Subsidi yang sudah mencapai Rp73,94 triliun (tumbuh 25,88 persen) dan Belanja Bantuan Sosial mencapai Rp45,08 triliun (tumbuh 74,97 persen). Realisasi Subsidi tersebut terdiri dari belanja subsidi BBM sebesar Rp35,41 triliun atau 75,56 persen dari pagu APBN tahun 2018, belanja subsidi listrik sebesar Rp24,10 triliun atau sebesar 50,56 persen, dan belanja subsidi non energi sebesar Rp14,43 atau sebesar 23,39 persen.

Realisasi TKDD sampai dengan akhir Juni 2018 telah mencapai Rp385,57 triliun atau 50,33 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp349,71 triliun dan Dana Desa Rp35,86 triliun. Realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp 338,65 triliun atau 50,05 persen dari pagu, Dana Insentif Daerah (DID) Rp4,25 triliun atau 50,00 persen dari pagu, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,82 triliun atau 32,37 persen dari pagu. Realisasi TKD sampai dengan akhir Juni 2018 lebih rendah Rp10,65 triliun atau 2,96 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017. Lebih rendahnya realisasi TKD

2018 terutama disebabkan oleh: (1) lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena adanya perubahan pola penyaluran DBH di Triwulan I Tahun 2018 yang semula 25 persen dari pagu pada tahun 2017 menjadi 20 persen dari pagu pada tahun 2018, dan adanya pembayaran kurang bayar tahun 2015 pada bulan Februari 2017; (2) lebih rendahnya realisasi DAK Fisik karena sebagian daerah penerima DAK Fisik belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran tahap I. Sesuai dengan PMK 112/PMK.07/2017 mengenai Pengelolaan TKDD, penyaluran DAK Fisik Tahap I sebesar 25 persen dapat dilakukan paling lambat bulan Juli. Oleh karena itu, daerah penerima DAK Fisik yang belum menerima penyaluran Tahap I dapat segera melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I dalam bulan Juli untuk menghindari tidak disalurkannya DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) PMK 112/PMK.07/2017. Realisasi Dana Desa sampai dengan akhir Juni 2018, lebih besar Rp1,47 triliun (4,26 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2017. Semakin baiknya penyaluran Dana Desa hingga akhir Juni 2018 diharapkan dapat menjadi stimulus bagi kegiatan perekonomian di pedesaan.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2018 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Juni 2018 mencapai Rp110,56 triliun atau sekitar 0,74 persen PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode yang sama tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Juni 2018 mencapai Rp176,25 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp176,00 triliun, atau mencapai 44,09 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp192,60 triliun atau mencapai 46,46 persen dari APBN tahun 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp16,60 triliun atau sekitar 108,47 persen dari rencana Pemerintah di tahun 2018. Realisasi pinjaman (neto) tersebut mencerminkan bahwa hingga bulan Juni 2018, Pemerintah telah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman yang dilakukan. Dengan realisasi tersebut, hingga Semester I tahun 2018 rasio Utang terhadap PDB mencapai 29,79 persen. Kondisi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang senantiasa melakukan pengelolaan utang yang *prudent* untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

REALISASI APBN 2018 S/D 30 JUNI 2018

	APBN 2018	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBNP
 PENDAPATAN NEGARA (A)	1,894,720.4	833,448.2	44,0%
 BELANJA NEGARA (B)	2,220,657.0	944,008.7	42,5%
 KESEIMBANGAN PRIMER	(87,329.5)	10,045.0	-11,5%
 SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,936.6)	(110,560.5)	
 PEMBIAYAAN ANGGARAN	325,936.6	176,246.7	54,1%

dalam miliar Rupiah

Realisasi APBN pada Semester I tahun 2018 menunjukkan kinerja yang semakin baik.

Realisasi pendapatan negara mencapai 44,00 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018 atau tumbuh 16,04 persen (yoy), lebih baik capaiannya dibandingkan realisasi pendapatan negara tahun 2017 yang mencapai 41,37 persen dari targetnya.

Selanjutnya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I tahun 2018 juga menunjukkan daya serap yang lebih baik, dimana penyerapan belanjanya mencapai 38,39 persen terhadap pagu atau tumbuh 12,01 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (36,47 persen terhadap pagu). Dengan komposisi capaian pendapatan negara dan belanja negara yang lebih baik pada Semester I tahun 2018, realisasi defisit anggaran dalam pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp110,6 triliun atau 0,75 persen dari PDB, jauh lebih baik dari capaian pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp175,1 triliun atau 1,3 persen dari PDB.

Secara singkat, realisasi pendapatan negara sampai dengan Semester I tahun 2018 sebagai berikut:

- Laju realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar

14,26 persen atau mencapai Rp653,5 triliun (40,39 persen dari target APBN tahun 2018) terutama bersumber dari:

- Penerimaan Pajak yang tumbuh sebesar 13,99 persen dengan capaian sebesar Rp581,54 triliun atau 40,84 persen dari target APBN tahun 2018.
 - Penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 16,66 persen dengan capaian sebesar Rp71,95 triliun atau 37,07 persen dari target APBN tahun 2018.
- Pertumbuhan realisasi PNPB juga menunjukkan nilai yang sangat positif sebesar 21,02 persen yang mampu membukukan nilai realisasi sebesar Rp176,83 triliun atau 64,20 persen dari target APBN tahun 2018.

Selanjutnya, untuk kinerja belanja negara sampai dengan Semester I tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

- Belanja pemerintah pusat tumbuh 12,01 persen, dengan capaian Rp558,44 triliun atau 38,39 persen dari pagu APBN tahun 2018.
- Sedangkan TKDD sedikit mengalami penurunan sebesar 2,33 persen dengan capaian Rp385,6 triliun atau 50,33 persen dari pagu APBN tahun 2018 .

Dengan gambaran fiskal tersebut, maka kinerja positif realisasi APBN tahun 2018 masih terjaga sampai dengan akhir Semester I tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan realisasi defisit anggaran sebesar 0,75 persen terhadap PDB atau Rp110,56 triliun (keseimbangan primer positif Rp10,05 triliun), turun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni 1,29 persen terhadap PDB atau Rp175,1 triliun (keseimbangan primer sebesar negatif Rp68,25 triliun). Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp176,25 triliun, Pemerintah telah mengantisipasi perkembangan pasar keuangan melalui strategi *frontloading*.

PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI

Sejalan dengan aktivitas pemulihan perekonomian global, perekonomian Indonesia pada Semester I tahun 2018 mampu melanjutkan tren penguatan pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan kinerja investasi sebagai motor penggerak utama. Kinerja ekonomi Indonesia pada periode ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tinggi. Peningkatan aktivitas investasi juga sejalan dengan pertumbuhan *double digit* impor yang didorong oleh kenaikan impor barang modal bahan baku pendukung infrastruktur, seperti traktor, bulldozer, crane, besi baja mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode ini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang. Daya beli masyarakat juga tetap stabil seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi, termasuk pada periode bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada triwulan pertama 2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semester pertama secara umum juga didukung dengan lingkungan makroekonomi Indonesia yang stabil.

Kondisi ini antara lain tercermin pada pergerakan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sepanjang semester

pertama tahun 2018 yang rendah dan terkendali. Laju inflasi bulan Januari s.d. Juni 2018 tercatat sebesar 1,90 persen (ytd) atau 3,12 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, inflasi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketersediaan pasokan pangan serta upaya stabilisasi harga yang dilakukan Pemerintah berkontribusi positif pada terkendalinya harga di tengah peningkatan permintaan, khususnya selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Sementara itu, dampak kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat, serta sentimen penerapan kebijakan proteksionisme, menyebabkan mata uang negara-negara di dunia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat,

termasuk nilai tukar rupiah. Hingga akhir Semester I tahun 2018 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS tercatat sebesar Rp13.746/USD. Pemerintah, bersama dengan

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan bauran kebijakan dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi makro jangka pendek namun tetap mendorong pertumbuhan jangka menengah.

Sejalan dengan perkembangan harga komoditas global, harga minyak mentah dunia juga terus menunjukkan tren peningkatan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pergerakan ICP juga menunjukkan peningkatan. Tren peningkatan harga minyak mentah terus berlanjut dan mencapai harga tertinggi di kuartal kedua tahun 2018. Keputusan OPEC dan Rusia untuk memperpanjang kesepakatan pemangkasan produksi hingga akhir tahun 2018 menjadi faktor utama tren peningkatan harga. Selain itu, adanya gangguan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah serta gangguan produksi di Venezuela turut mendukung semakin meningkatnya harga minyak mentah. Harga minyak mentah utama dunia, *West Texas Intermediate* (WTI) dan *Brent* hingga

Semester I tahun 2018 tercatat masing-masing sebesar USD 68,3 per barel dan USD 70,8 per barel. Sejalan dengan tren peningkatan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia juga tercatat meningkat. Rata-rata ICP Semester I tahun 2018 tercatat sebesar USD 66,6 per barel, lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 48,9 per barel. Peningkatan harga minyak ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap kinerja penerimaan negara.

Dalam mengantisipasi keseimbangan baru perekonomian global, Pemerintah dan otoritas akan meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat bauran kebijakan untuk memprioritaskan stabilitas.

Menjaga stabilitas di jangka pendek merupakan modal penting dan menjadi prasyarat untuk pembangunan dan pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang. Di sisi fiskal, Pemerintah akan melanjutkan pengelolaan fiskal yang kredibel dan produktif. Selain itu, Pemerintah juga akan fokus pada penguatan struktur ekonomi, antara lain dengan mendorong ekspor dan investasi. Kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN 2018 berada dalam jalur yang tepat serta kredibel, sehingga turut mendukung stabilitas perekonomian. Kinerja realisasi anggaran 2018 menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan kualitas anggaran juga terlihat dengan membaiknya pendapatan negara yang tercermin dari meningkatnya aktivitas perekonomian dan pola pelaksanaan belanja negara yang positif.

WTP Bukan Sekadar Opini bagi LKPP

Sebagai tahapan akhir dari siklus pengelolaan keuangan negara, pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada DPR dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP dimaksud disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. Demikianlah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Opini WTP atas LKPP

LKPP 2017 disusun oleh pemerintah dan telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 28 Maret 2018, dengan status belum diperiksa (*Unaudited*). Selanjutnya, BPK memberikan Opini WTP atas LKPP Tahun 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017. Pemerintah berhasil mempertahankan capaian opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017, setelah sebelumnya Opini WTP diberikan BPK untuk pertama kali atas LKPP Tahun 2016.

Opini WTP atas LKPP Tahun 2017 secara tidak langsung mengisyaratkan pesan kepada publik bahwa APBN TA 2017 telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Diharapkan, hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan tingkat kemiskinan, dan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun tercapai. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen Pemerintah untuk senantiasa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

LKPP tahun 2017 merupakan konsolidasian dari 87 (delapan puluh tujuh) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, capaian Opini WTP atas LKPP tahun 2017 tidak terlepas dari kualitas LKKL dan LKBUN tahun 2017. Dalam LHP atas LKPP Tahun 2017, dilaporkan bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) LKKL

yang mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 6 (enam) LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” dan 2 (dua) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”.

Disamping itu, LKBUN Tahun 2017 juga kembali mendapatkan opini WTP, sebagaimana opini LKBUN tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan yang cukup signifikan, karena LKKL yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 73 LKKL menjadi 79 LKKL dan yang mendapatkan opini TMP berkurang dari 6 LKKL menjadi hanya 2 LKKL.

Laporan keuangan dengan kualitas opini WTP bukan berarti tidak memiliki temuan ataupun rekomendasi perbaikan dari BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2017, masih terdapat 18 Temuan Pemeriksaan yang terdiri atas 13 temuan yang terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 5 temuan yang terkait Kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Namun, temuan-temuan tersebut tidak bersifat material atau tidak berpengaruh terhadap kewajaran angka yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini WTP adalah tingkatan tertinggi dalam menunjukkan hasil penilaian atas kualitas sebuah laporan keuangan. Opini WTP menunjukkan bahwa semua komponen laporan keuangan telah disajikan secara wajar atas seluruh hal yang bersifat material di dalam laporan tersebut. Laporan Keuangan yang berkualitas WTP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Disamping itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah misalnya dalam hal perencanaan dan penganggaran periode berikutnya, sehingga pengelolaan keuangan negara akan semakin efektif, efisien, akuntabel dan kredibel.

Perkembangan Basis Akuntansi dalam Penyusunan LKPP

LKPP tahun 2017 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga Pemerintah menerapkan basis akrua dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan akuntansi berbasis akrua

merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena berdasarkan data *International Federation of Accountants* (IFAC) tidak banyak negara yang berhasil menerapkan akuntansi berbasis akrual ini. Akuntansi berbasis akrual baru diterapkan di sejumlah negara maju antara lain Australia, Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan Swedia. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia, selain dapat menyediakan informasi yang lebih baik, juga telah dapat mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju, yang diharapkan juga akan berdampak pada persepsi dunia Internasional terhadap kualitas pengelolaan keuangan di Indonesia.

Penerapan SAP berbasis akrual tersebut merupakan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur bahwa standar akuntansi berbasis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015 merupakan salah satu wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan amanat UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan UU Keuangan Negara, Pemerintah diamanatkan untuk menerapkan basis akrual dalam pelaporan keuangan paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Keuangan Negara ditetapkan yakni tahun

2008. Namun ternyata amanat UU untuk penerapan basis akrual merupakan tantangan yang tidak mudah, karena Pemerintah perlu menyiapkan berbagai perangkat sistem dan kebijakan, termasuk penyiapan Sumber Daya Manusia yang memerlukan waktu lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menunda penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan hingga tahun 2015, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010.

Sebelum menggunakan basis akrual, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah menyusun laporan keuangan menggunakan basis Kas menuju Akrual (*Cash Towards Accrual*). Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual diatur dalam PP 24 tahun 2005. Dengan basis kas menuju akrual tersebut, pendapatan dan belanja dicatat menggunakan basis kas, sedangkan aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat menggunakan basis akrual.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PP 71 tahun 2010, Pemerintah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan tahun 2015. LKPP tahun 2015 merupakan LKPP pertama yang disusun berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual. Walaupun terjadi perubahan basis akuntansi, Pemerintah berhasil mempertahankan opini WDP atas

LKPP Tahun 2015. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena pada tahun pertama penerapan basis akrual LKPP berhasil dipertahankan mendapatkan opini WDP. Pada umumnya, perubahan basis dalam pelaporan keuangan sebuah negara berpengaruh pada turunnya kualitas opini laporan keuangan yang diberikan oleh auditor.

Prestasi selanjutnya yang juga merupakan berkah bagi bangsa Indonesia adalah pada tahun kedua penerapan akuntansi berbasis akrual, BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun ketiga penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah berhasil mempertahankan Opini WTP, yaitu atas LKPP Tahun 2017.

Komponen LKPP Tahun 2017

LKPP tahun 2017 terdiri dari tujuh komponen laporan, yaitu Laporan Realisasi APBN (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ketujuh laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah selama satu periode pelaporan.

Ringkasan informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

(dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2017 (Audited)			Realisasi TA 2016 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran	Realisasi	%		
Pendapatan Negara dan Hibah	1.736,06	1.666,38	95,99	1.555,93	110,45
Belanja Negara:	2.133,30	2.007,35	94,10	1.864,28	143,07
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.366,96	1.265,36	92,57	1.154,02	111,34
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,34	741,99	96,82	710,26	31,73
Surplus (Defisit) Anggaran	(397,24)	(340,98)	85,84	(308,34)	32,64
Pembiayaan Neto	397,24	366,62	92,29	334,50	32,12
SiLPA (SiKPA)		25,65		26,16	(0,51)

1. Laporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi APBN menjelaskan mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan Laporan Realisasi

APBN TA 2017, realisasi Pendapatan Negara adalah sebesar Rp1.666,38 triliun atau 95,99 persen dari APBN-P TA 2017. Pendapatan Negara TA 2017 meningkat sebesar Rp110,45 triliun atau 7,1 persen dibandingkan

dengan realisasi TA 2016. Realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.343,53 triliun, PNBPN sebesar Rp311,22 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp11,63 triliun.

Realisasi Belanja Negara TA 2017 adalah sebesar Rp2.007,35 triliun atau 94,10 persen dari target APBN-P TA 2017. Realisasi Belanja tersebut meningkat Rp143,07 triliun atau 7,7 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Realisasi Belanja dimaksud terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265,36 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741,99 triliun. Peningkatan realisasi Belanja Negara tahun 2017 mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai *tools* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping kuantitas, belanja negara juga mengalami peningkatan dari segi kualitas yang diindikasikan dengan capaian output yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, di antaranya pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan desa, penyaluran Kartu Indonesia Pintar,

penyaluran Kartu Indonesia Sehat, serta penyaluran Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja pada tahun 2017, terdapat Defisit sebesar Rp340,98 triliun. Realisasi Defisit ini berada pada kisaran yang aman, yakni 2,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau jauh lebih rendah dari defisit indikatif dalam undang-undang APBN-P TA 2017 sebesar 2,92 persen. Apabila Defisit LRA berbasis kas tersebut dikonversi menjadi basis akrual (bukan Defisit LO), maka defisitnya menjadi Rp224,55 triliun (1,65 persen terhadap PDB), lebih baik jika dibandingkan dengan defisit LRA berbasis kas. Realisasi Defisit tersebut juga masih di bawah ambang batas 3 persen yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dengan terus berupaya meningkatkan penerimaan negara serta menjaga disiplin belanja negara.

Defisit anggaran tersebut selanjutnya ditutup dengan Pembiayaan (neto) sebesar Rp366,62 triliun, yang berasal dari sumber Pembiayaan Dalam Negeri (neto) sebesar Rp386,89 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar minus Rp20,27 triliun. Dengan demikian, dihasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk TA 2017 sebesar Rp25,65 triliun.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2017. Dalam LPSAL dilaporkan bahwa SAL Awal TA 2017 adalah sebesar Rp113,19 triliun. Selanjutnya,

(dalam Triliun Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
1	SAL awal	113,19	107,91
2	Penyesuaian SAL Awal	-	0,35
3	Penggunaan SAL	-	(19,01)
4	SiLPA/SiKPA	25,65	26,16
5	Penyesuaian SAL	(0,49)	(2,23)
6	SAL akhir	138,35	113,19

ditambah SiLPA TA 2017 sebesar Rp25,65 triliun dan dikurangi penyesuaian SAL Rp0,49 triliun, maka SAL akhir TA 2017 menjadi Rp138,35 triliun.

3. Neraca

(dalam Triliun Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	Kenaikan/ (Penurunan)	Persentase
Aset				
Aset Lancar	336,81	304,61	32,20	10,57%
Investasi Jangka Panjang	2.604,05	2.411,82	192,23	7,97%
Aset Tetap	2.034,80	1.921,79	113,01	5,88%
Piutang Jangka Panjang	47,81	47,13	0,68	1,46%
Aset Lainnya	924,36	771,52	152,84	19,81%
Total Aset	5.947,83	5.456,88	490,95	9,00%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	593,45	387,44	206,01	53,17%
Kewajiban Jangka Panjang	3.813,60	3.502,51	311,09	8,88%
Total Kewajiban	4.407,05	3.889,95	517,11	13,29%
Ekuitas	1.540,78	1.566,93	(26,15)	(1,67%)
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.947,83	5.456,88	490,95	9,00%

Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah berupa aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2017. Posisi keuangan Pemerintah dalam Neraca per 31 Desember 2017 terdiri dari Aset sebesar Rp5.947,83 triliun, Kewajiban sebesar Rp4.407,05 triliun, dan Ekuitas sebesar Rp1.540,78 triliun.

Selama tahun 2017 terdapat kenaikan aset sebesar Rp490,95 Triliun atau 9 persen dari Aset per 31 Desember 2016. Setelah diperhitungkan dengan Kewajiban per 31 Desember 2017 yang lebih tinggi sebesar Rp517,11 triliun atau 13,29 persen dari Kewajiban per 31 Desember 2016, maka Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 menjadi lebih rendah sebesar Rp26,15 triliun atau 1,67 persen dari Ekuitas per 31 Desember 2016.

Penurunan ekuitas pemerintah pusat ini disebabkan antara lain karena tidak semua belanja negara dapat dinilai dan dikapitalisasi sebagai aset milik Pemerintah Pusat sebagaimana aset infrastruktur. Contohnya, alokasi

belanja untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan sebagian besar belanja negara yang tidak dapat diperhitungkan menambah aset pemerintah pusat. Belanja tersebut meliputi antara lain adalah belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan transfer ke daerah. Hasil dari jenis-jenis belanja ini sangat penting, seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, maupun peningkatan kemampuan keuangan bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan di daerah.

Peningkatan kewajiban tahun 2017 sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), terutama yang digunakan

dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan dana jaminan sosial. Meskipun demikian, rasio utang Pemerintah tetap terjaga pada tingkat yang aman, pada kisaran 29,4 persen terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah batasan 60 persen yang diatur dalam undang – undang.

4. Laporan Operasional (LO)

(dalam Triliun Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Pendapatan-LO	1.806,52	1.664,66
2	Beban	1.991,67	1.872,34
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(185,15)	(207,68)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	72,17	67,96
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(112,98)	(139,72)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang diterima menambah ekuitas dan penggunaannya, yang dikelola oleh Pemerintah dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam LO dapat disampaikan bahwa Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.806,52 triliun dan Beban adalah sebesar Rp1.991,67 triliun, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp185,15 triliun.

Walaupun Rasio tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah tetap sangat berhati-hati (*prudent*) dalam menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya *rating* utang Indonesia menjadi *Investment Grade* yang diberikan oleh lima lembaga rating dunia: S&P, Moody's, Fitch, JCR, dan R&I.

Disamping itu, terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,17 triliun. Dengan demikian, Defisit LO untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp112,98 triliun. Defisit LO ini merupakan defisit terkecil dalam tiga tahun terakhir, yaitu apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2016 sebesar Rp139,72 triliun dan Defisit LO Tahun 2015 sebesar Rp243,28 triliun.

5. Laporan Arus Kas

(dalam Triliun Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Saldo Awal Kas	174,08	192,28
Penyesuaian Saldo Awal	-	(4,52)
Saldo Awal Kas setelah Penyesuaian	174,08	187,76
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(132,52)	(139,01)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(268,12)	(258,16)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	426,29	423,33
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9,37	(18,99)
Penggunaan SAL	-	(19,01)
Penyesuaian Pembukuan	(0,59)	(1,84)
Kenaikan (Penurunan) Kas	34,43	(13,68)
Saldo Akhir Kas	208,51	174,08
Saldo Kas Pemerintah Lainnya		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,21	0,26
Kas di Bendahara Penerimaan	0,11	0,13
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	2,85	3,18
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(12,20)	(3,93)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	(0,0074)	0,0063
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(65,21)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,33	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	134,58	173,74

Laporan Arus Kas Tahun 2017 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara, yang terdiri dari: arus kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp132,52 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp268,12 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp426,29 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp9,37 triliun. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama dalam berbagai proyek infrastruktur.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Ekuitas Awal	1.566,93	1.669,79
2	Penyesuaian Ekuitas Awal	-	(1,53)
3	Ekuitas Awal setelah Penyesuaian	1.566,93	1.668,26
4	Surplus/Defisit LO	(112,98)	(139,72)
5	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	84,97	37,07
6	Transaksi Antar Entitas	0,18	(0,072)
7	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	1,68	1,40
8	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(26,15)	(101,33)
9	Ekuitas Akhir	1.540,78	1.566,93

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun 2017. Laporan Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa Ekuitas Awal TA 2017 adalah sebesar Rp1.566,93 triliun. Setelah memperhitungkan Defisit LO Tahun 2017 sebesar Rp112,98 triliun, Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas sebesar Rp84,97 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas sebesar Rp1,68 triliun, maka Ekuitas Akhir Pemerintah Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat

memperoleh informasi yang cukup dan memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Manfaat LKPP yang memperoleh opini WTP

Opini WTP atas LKPP Tahun 2017 dan Tahun 2016, langsung atau tidak langsung telah membawa banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Setidaknya terdapat tiga manfaat terbesar yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pertama, terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat dunia kepada Indonesia yang dibuktikan dengan naiknya rating Indonesia menjadi Layak Investasi (*Investment Grade*) dari 5 (lima) Lembaga *Rating* Internasional. Tentunya banyak faktor yang juga turut berpengaruh. Namun demikian, secara sederhana dapat direlasikan bahwa LKPP yang memperoleh opini WTP tentunya akan meningkatkan kepercayaan para investor bahwa pengelolaan Keuangan Negara telah dilakukan dengan baik yang diharapkan tidak akan berdampak negatif terhadap investasi yang akan mereka lakukan. Status layak investasi ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, dan sarana serta prasarana untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, disamping terus menguatkan penegakan hukum, memajukan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta menguatkan kedaulatan dan martabat bangsa di kancah dunia internasional.

Kedua, biaya modal pemerintah untuk mengambil pinjaman

menjadi lebih murah, yang antara lain ditunjukkan dengan turunnya yield Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini juga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan Pemerintah untuk memperoleh pinjaman dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Ketiga, LKPP dapat menjadi alat yang andal dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk menentukan besarnya target aset yang akan dibentuk Pemerintah di masa depan, menjaga target utang yang diperkenankan, hingga target kemampuan keuangan Pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan atas berbagai kegiatan pembangunan, baik yang bersifat fisik infrastruktur, maupun yang bersifat nonfisik tetapi sangat penting dalam menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang.

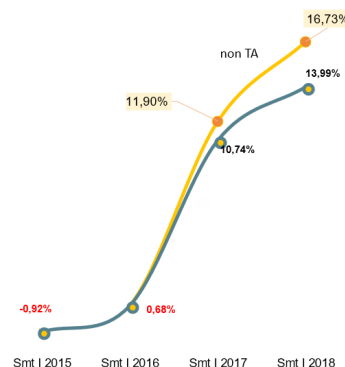
Selanjutnya, Pemerintah perlu menjaga momentum penilaian WTP atas LKPP ini sehingga di masa yang akan datang Opini WTP atas LKPP dapat dipertahankan, dan segala kendala yang menjadi risiko keuangan negara dapat diantisipasi dan diselesaikan dengan baik.

PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak pada Semester I tahun 2018 Capai 16,73 %

(di luar Tax Amnesty)

Pertumbuhan
(y-o-y) Bulan
Januari - Juni
2015-2018



Realisasi penerimaan pajak pada semester I tahun 2018 tercatat sebesar Rp 581,54 triliun atau tumbuh 13,99 persen secara *year-on-year*. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 14,85 persen serta PPN&PPnBM yang tumbuh 13,63 persen. Tanpa memperhitungkan uang tebusan *Tax Amnesty* di triwulan I tahun 2017 (merupakan penerimaan *one-off*, sebesar Rp 12,03 triliun), maka pertumbuhan penerimaan pajak pada semester I tahun 2018

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi
Penerimaan
Pajak s/d
30 Juni 2018

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 30 Juni 2018		
		Rp	Δ% 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	359,40	14,32%	42,03%
- Migas	38,13	30,06	9,13%	78,84%
- Non Migas	817,00	329,34	14,85%	40,31%
PPN & PPnBM	541,80	218,12	13,63%	40,26%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	4,02	2,73%	14,85%
Jumlah	1.423,99	581,54	13,99%	40,84%

mencapai 16,73 persen atau tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Pertumbuhan positif beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, serta PPh dan PPN Impor memberikan sinyal positif peningkatan aktivitas ekonomi setidaknya dari perspektif penerimaan pajak.

Pertumbuhan beberapa jenis pajak utama pada semester I tahun 2018 bahkan mencapai di atas 20 persen seperti PPh Pasal 21 (22,26 persen), PPh Badan (23,81 persen), PPh 22 Impor (28,00 persen) dan PPN Impor (24,29 persen).

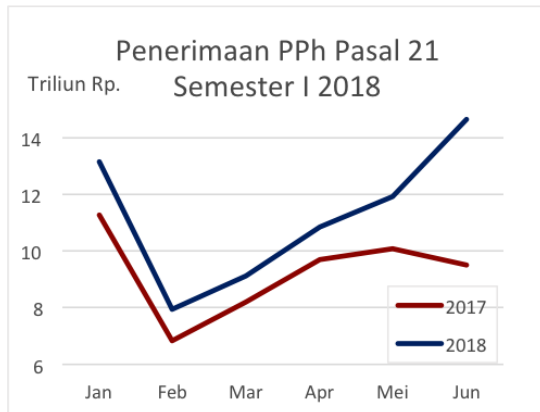
Khusus untuk jenis pajak PPh Pasal 21, pertumbuhan PPh Pasal 21 pada semester I tahun 2018 tidak lepas dari pengaruh pembayaran THR (tunjangan hari raya) sebelum libur Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Pusat sendiri mengalokasikan dalam APBN untuk pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13 dan THR tahun 2018 sebesar Rp35,76 triliun.¹

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan PPN Dalam Negeri mencapai 9,12 persen atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun 2017 sebesar 14,20 persen. Pelambatan ini lebih disebabkan oleh antara lain : (1) pergeseran sebagian pembayaran ke awal bulan Juli 2018 mengingat akhir Juni 2018 adalah hari libur, (2) peningkatan restitusi PPN dibanding

Pertumbuhan
Pajak
Berdasarkan
Jenis

Jenis Pajak	growth y-o-y Semester I 2017	growth y-o-y Semester I 2018
PPh Pasal 21	-4,08%	22,26%
PPh Badan	12,25%	23,81%
PPN Dalam Negeri	14,20%	9,12%
Pajak atas Impor	12,94%	24,64%
- PPh 22 Impor	11,35%	28,00%
- PPN Impor	14,25%	24,29%
- PPnBM Impor	-8,13%	1,65%

1. Siaran Pers Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 Tahun 2018, Kementerian Keuangan



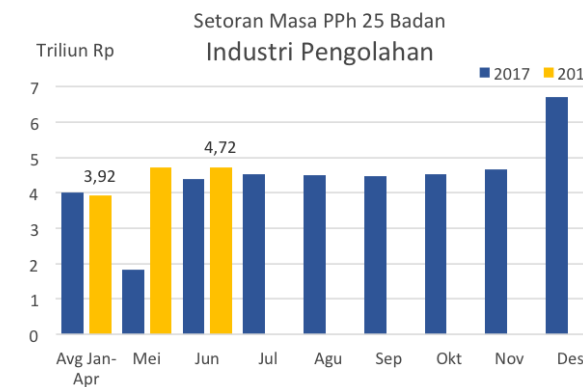
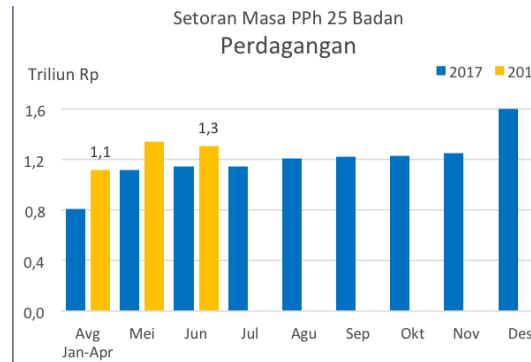
Penerimaan PPh Pasal 21 Semester I 2018

periode yang sama tahun 2017 (5,03 persen), serta (3) penurunan setoran PPN yang berasal dari belanja barang dan modal pemerintah sebagai dampak libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri.

Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama yang tumbuh cukup bagus seperti Industri Pengolahan (12,64 persen), Perdagangan (27,91 persen), Jasa Keuangan (4,74 persen), Konstruksi dan Real Estate (11,40 persen), dan Pertanian

(34,25 persen). Khusus untuk sektor Pertambangan, pertumbuhannya sangat signifikan mencapai 79,71 persen seiring dengan membaiknya harga komoditas. Secara keseluruhan pertumbuhan penerimaan sektoral utama rata-rata lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PPh Badan (PPh Pasal 25) pada Semester I tahun 2018 yang mencapai 23,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 merefleksikan pertumbuhan signifikan penerimaan setoran tahunan PPh Badan dari penerimaan SPT Tahunan yang batas pelaporannya jatuh pada tanggal 30 April silam, dimana setoran tahunan mampu tumbuh 17,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setoran tahunan merupakan dasar perhitungan angsuran bulanan PPh Badan untuk satu tahun Pajak ke depan, sehingga hal ini tentunya



memberikan tambahan optimisme pencapaian penerimaan hingga akhir tahun, mengingat bahwa apabila tidak ada perubahan struktur ekonomi yang signifikan nilai angsuran bulanan PPh Badan relatif tetap. Disamping itu, disebabkan karena sifatnya yang relatif tetap dan *predictable* tersebut, PPh Badan masih menjadi komponen yang *reliable* bagi stabilitas *cash flow* penerimaan pajak.

Efeknya dapat dilihat pada peningkatan setoran masa (angsuran bulanan) PPh Badan pasca penerimaan SPT Tahunan. Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Januari s.d. April dari Wajib Pajak yang bergerak di sektor Industri Pengolahan rata-rata sebesar Rp3,92 triliun, meningkat menjadi Rp4,72 triliun di bulan Juni 2018. Demikian pula halnya dengan sektor utama lainnya yang menunjukkan peningkatan nominal pembayaran angsuran bulanan PPh Badan pasca penerimaan SPT Tahunan, seperti sektor Pertambangan dan sektor Perdagangan.

sektor usaha	Rp realisasi penerimaan pajak 2018 & kontribusi	growth year-on-year Semester I 2018 vs Semester I 2017
Industri Pengolahan	Rp 164,03 T (30,3%)	12.64% (vs 17.57% 2017)
Perdagangan	Rp 111,76 T (20,6%)	27.91% (vs 13.77% 2017)
Jasa Keuangan	Rp 76,72 T (14,2%)	4.74% (-0.27% 2017)
Pertambangan	Rp 38,75 T (7,2%)	79.71% (vs 30.98% 2017)
Konstruksi & Real Estat	Rp 35,19 T (6,5%)	11.40% (-0.27% 2017)
Pertanian	Rp 10,87 T (2,0%)	34.25% (vs 18.06% 2017)

Mulai 1 Juli 2018 Tarif Pajak UMKM Turun Setengahnya

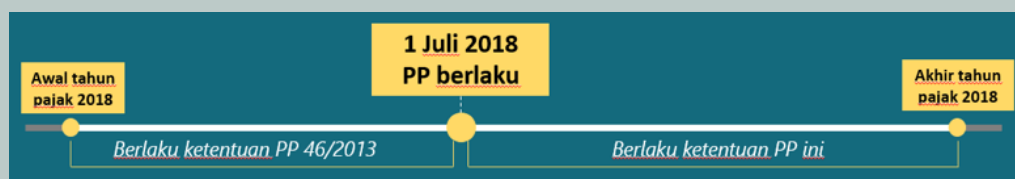
Pada tanggal 8 Juni 2018 silam, Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang merupakan revisi dari PP 46 Tahun 2013. Dalam revisi tersebut, tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Wajib Pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan omzet setahun di bawah Rp 4,8 miliar diturunkan dari saat ini 1 persen menjadi 0,5 persen dari nilai omzet.

Selain tarif, perubahan terbesar dalam revisi ini adalah perihal jangka waktu pengenaan tarif yang dijabarkan dalam tiga kategori: 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; 4 tahun pajak bagi Wajib

Pajak Badan; dan 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Tarif 0,5 persen ini berlaku terbatas dalam jangka waktu tersebut. Setelah itu, Wajib Pajak didorong untuk masuk dalam sistem pajak normal dengan pengenaan tarif PPh non-final. Aturan ini mulai berlaku 1 Juli 2018.

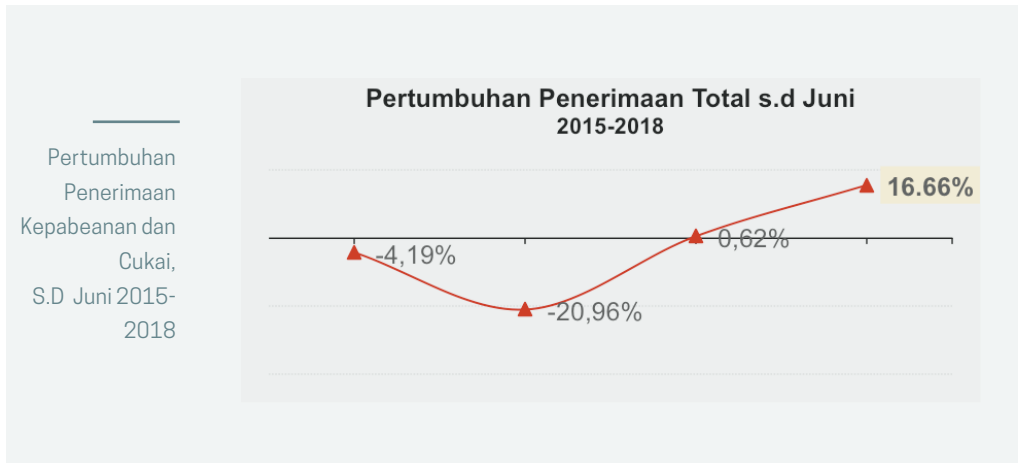
Dalam jangka pendek, hal ini tentu akan memberikan efek pada penurunan penerimaan PPh dari sektor UMKM, namun dengan relaksasi ini diharapkan sektor UMKM ini semakin berkembang sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sehingga penerimaan pajak dari sektor UMKM akan meningkat.

Halaman Kosong



KEPABEANAN DAN CUKAI

Pertumbuhan penerimaan kepabeanaan dan cukai 16,66 persen tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Capaian penerimaan bea keluar (BK) tembus 109,41 persen dari target.



Kinerja penerimaan DJBC dalam Semester I tahun 2018 mencatatkan **pertumbuhan tertinggi dalam tiga tahun terakhir yaitu 16,66 persen.**

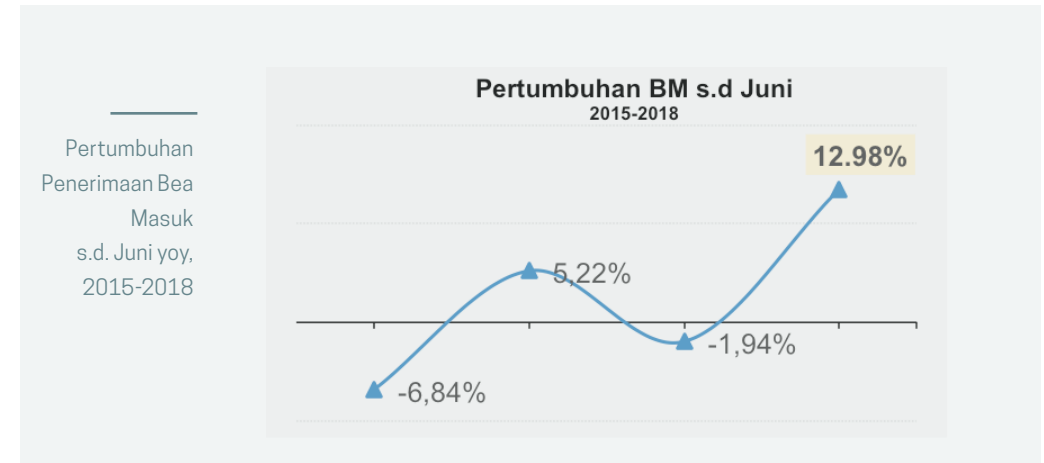
Perdagangan internasional yang membaik dan perbaikan kebijakan kepabeanaan dan cukai seperti penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) dan penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT), yang merupakan salah satu program reformasi kepabeanaan dan cukai (PRKC) ikut berperan pada capaian tersebut.

Penerimaan kepabeanaan dan cukai dalam semester I tahun 2018 mencapai Rp71,95 triliun atau 37,07 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Pertumbuhan positif tersebut terdapat pada

semua komponen baik penerimaan bea masuk, bea keluar maupun cukai yang didukung oleh kebijakan tarif yang efektif, membaiknya aktifitas ekspor impor, serta peningkatan harga komoditas di pasar global.

Tren positif juga terjadi pada komponen penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari PPN Impor, PPh BM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor. Hingga akhir Juni 2018 total PDRI yang dihimpun DJBC sebesar Rp112,96 triliun, tumbuh 24,64 persen (yoy). Secara total jumlah penerimaan negara yang dihimpun DJBC sepanjang Semester 1 tahun 2018 adalah sebesar Rp184,92 triliun, tumbuh 21,41 persen dibanding capaian periode serupa tahun lalu.

Pertumbuhan penerimaan bea masuk (BM) sampai dengan bulan Juni 2018 sebesar 12,98 persen, merupakan yang tertinggi bila dibandingkan pertumbuhan penerimaan BM dalam 3 tahun terakhir. Penerimaan BM sepanjang Semester I telah mencapai Rp17,71 triliun atau 49,61 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi



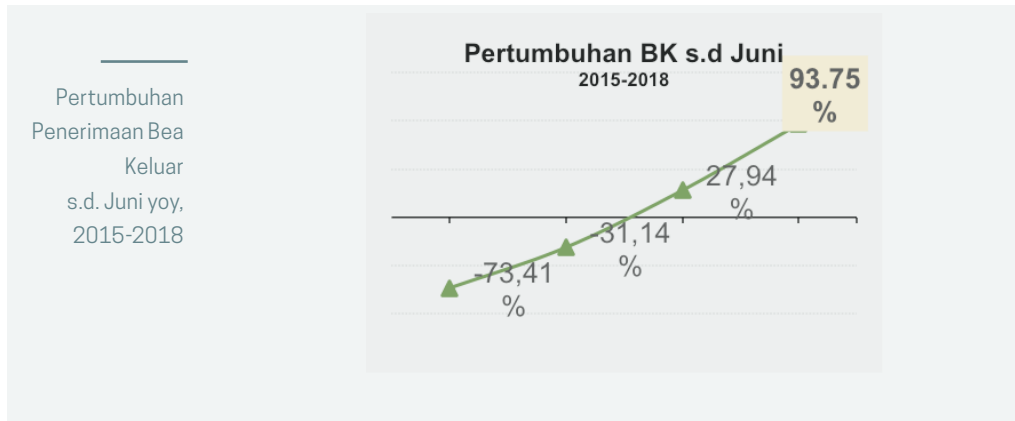
penerimaan BM tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,04 triliun.

Capaian penerimaan diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat positif maupun negatif. Tingginya devisa impor yang mencapai Rp87,47 triliun atau tumbuh 8,35 persen (yoy) memberi dorongan positif terhadap penerimaan BM. Pertumbuhan impor tersebut didominasi terutama oleh impor Bahan Baku/Barang Penolong dan Barang Modal yang tumbuh masing-masing sebesar 8,69 persen dan 8,65 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan bergairahnya aktifitas produksi nasional baik untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan barang secara domestik maupun ekspor.

Di sektor industri, industri pengolahan berkontribusi tertinggi pada devisa impor sebesar 87,95 persen dan sepanjang Semester I mengalami pertumbuhan 7,05 persen. Bergairahnya aktifitas produksi dalam negeri tersebut memberikan indikasi adanya ruang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Efek Lebaran turut memberikan pengaruh positif terhadap kinerja impor melalui peningkatan impor barang konsumsi yang diperlukan oleh masyarakat guna persiapan Ramadhan dan Lebaran. Kebijakan pemerintah mengimpor komoditas tertentu dengan kuota dalam rangka pengendalian harga juga memberikan andil pertumbuhan penerimaan BM.

Peningkatan kinerja impor tersebut di satu sisi memang menyebabkan tekanan pada Neraca Perdagangan yang sampai dengan bulan Juni 2018 mencapai negatif USD 0,19 miliar. Namun demikian, peningkatan kinerja impor didominasi oleh komoditas bahan baku/penolong dan barang modal yang dipergunakan



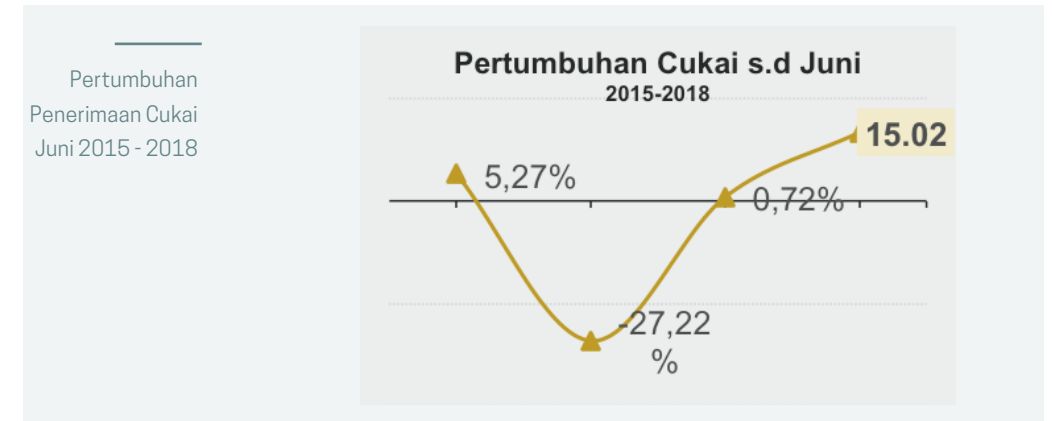
untuk memproduksi barang baik untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun guna mendorong ekspor. Hal ini tentunya berdampak produktif terhadap perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ekspor komoditas mineral yang tumbuh signifikan sebesar 181,46 persen, menjadi kontributor utama penerimaan BK yang hingga semester I tahun 2018 mencapai Rp3,28 triliun atau 109,41 persen dari target APBN tahun 2018. Pertumbuhan ekspor komoditas mineral tersebut tidak terlepas dari pengaruh tren membaiknya harga komoditas di pasar internasional dan meningkatnya permintaan di negara-negara tujuan utama.

Di sisi institusional, kelancaran pemberian ijin/ kuota ekspor komoditas (minerba) dan tidak adanya halangan yang berarti dalam penyediaan pasokan (*supply disruption*) komoditas ekspor minerba di situs

tambang juga memberikan andil positif terhadap peningkatan kinerja ekspor minerba sejak awal Semester I tahun 2018. Kinerja positif dalam aspek fundamental tersebut secara keseluruhan mendorong pertumbuhan penerimaan BK secara signifikan sebesar 93,75 persen.

Capaian penerimaan cukai pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp50,96 triliun atau 32,79 persen dari target APBN tahun 2018. Capaian tersebut tumbuh 15,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. **Capaian penerimaan cukai pada Semester I tahun 2018 merupakan yang tertinggi dibandingkan komponen penerimaan lainnya.**



Cukai hasil tembakau (CHT) masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan cukai sebesar Rp48,50 triliun atau 32,72 persen dari target APBN tahun 2018, serta tumbuh 14,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerja penerimaan CHT didorong oleh tarif tertimbang efektif sebesar 11,35 persen yang lebih tinggi dari kenaikan tarif rata-rata tahun 2018 yang 10,04 persen. Faktor lainnya adalah kenaikan produksi hasil tembakau (HT) yang mencapai 149,32 miliar batang atau tumbuh 2,35 persen, yang terjadi secara menyeluruh di semua golongan produksi. Hal tersebut menjadi indikasi keberhasilan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang dilakukan sejak tahun 2017 yang dilanjutkan hingga tahun ini.

Cukai atas minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) memberikan kontribusi masing-masing sebesar Rp2,36 triliun dan Rp0,07 triliun atau 36,37 persen dan 38,34 persen dari target APBN tahun 2018.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Realisasi PNBP s/d 30 Juni 2018 (dalam miliar Rupiah)

	2018 APBN	Realisasi s.d 30 Juni 2018	% thd APBN	Growth
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.427,92	176.832,70	64,20%	21,02%
A. Penerimaan SDA	103.674,80	75.106,10	72,44%	43,49%
1 Migas	80.349,00	58.751,06	73,12%	47,95%
a Minyak Bumi	59.582,70	58.750,93	98,60%	47,95%
b Gas Alam	20.766,30	0.13	0,00%	0,00%
2 Non Migas	23.325,80	16.355,04	70,12%	29,09%
a Pertambangan Minerba	17.858,52	13.963,44	78,19%	33,14%
b Kehutanan	4.166,71	1.920,23	46,09%	9,74%
c Perikanan	600,00	249,25	41,54%	41,89%
d Pend. Per. Panas Bumi	700,59	222,12	31,70%	-13,27%
B Pendapatan dari KND	44.695,40	35.524,70	79,48%	12,95%
C. PNBP Lainnya	83.753,12	45.479,30	54,30%	8,53%
D. Pendapatan BLU	43.304,60	20.722,60	47,85%	1,66%

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, realisasi PNBP mencapai Rp176,83 triliun atau 64,20 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 21,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara sepanjang Semester I tahun 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp58,75 triliun atau 73,12 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 47,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut, antara lain disebabkan karena lebih tingginya realisasi ICP periode bulan Desember 2017 s.d. Juni 2018, yaitu sebesar USD 65,76/barel atau periode bulan Januari s.d. Juni 2018,

yaitu sebesar USD 66,55/barel, dibandingkan realisasi ICP bulan Desember 2016 s.d. Juni 2017, yaitu sebesar USD 49,21/barel atau periode bulan Januari s.d. Juni 2017, yaitu sebesar USD 48,90/barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp16,35 triliun atau 70,12 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 29,09 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp12,67 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari s.d. Juni 2018 yang mencapai USD 96,50 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari s.d. Juni 2017 sebesar USD 82,21 per ton.

Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp35,52 triliun atau 79,48 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 12,95 persen jika dibandingkan dengan periode yang

sama tahun 2017 yang mencapai Rp31,45 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan perbaikan kinerja BUMN.

Realisasi penerimaan Lainnya mencapai Rp45,48 triliun atau 54,30 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 8,53 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp41,90 triliun. Peningkatan realisasi penerimaan PNBP Lainnya ini antara lain disebabkan kenaikan realisasi Penjualan Hasil Tambang yang mencapai Rp8,99 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp6,98 triliun, sejalan dengan peningkatan HBA.

Untuk pendapatan BLU, hingga 30 Juni 2018 terealisasi sebesar Rp20,72 triliun, atau mencapai 47,85 persen dari target APBN tahun 2018, meningkat 1,66 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp20,38 triliun.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi Belanja Barang, Bantuan Sosial, dan Pembayaran Subsidi

(dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2018			
	APBNP	Realisasi s.d. Juni 2018	% thd APBNP	Growth
Belanja K/L	847,44	295,99	34,93%	12,14%
Belanja Pegawai	227,46	103,77	45,62%	10,92%
Belanja Barang	338,83	106,39	31,40%	9,54%
Belanja Modal	203,88	40,75	19,99%	-14,19%
Bantuan Sosial	77,26	45,08	58,35%	74,97%
Belanja Non K/L	607,06	262,45	43,23%	11,86%
Pembayaran Bunga Utang	238,61	120,61	50,55%	12,88%
Subsidi	156,23	73,94	47,33%	25,88%
Belanja Lain-lain	212,22	67,90	31,99%	-1,66%
Jumlah	1.454,49	558,44	38,39%	12,01%

Realisasi BPP pada Semester I tahun 2018 (s.d. 30 Juni 2018) mencapai Rp558,44 triliun atau 38,39 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Sedangkan realisasi BPP selama bulan Juni 2018 mencapai Rp100,43 triliun atau sekitar 6,91 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Komposisi BPP tersebut terdiri dari : (1) belanja K/L sebesar Rp295,99 triliun atau 34,93 persen dari pagu alokasi APBN 2018; dan (2) Belanja NonK/L sebesar Rp262,45 triliun atau 43,23 persen dari pagu alokasi APBN 2018.

Realisasi BPP pada Semester I tahun 2018 menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik daripada realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2017, baik dari sisi nominal anggaran maupun persentase anggaran. Peningkatan kinerja penyerapan anggaran tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain kebijakan penyiapan sebelum anggaran berjalan, percepatan kegiatan, dan monitoring program/kegiatan yang lebih baik.

Peningkatan realisasi BPP pada Semester I tahun 2018 tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas penganggaran dan pelaksanaan BPP yang terus menerus dilakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Hal tersebut antara lain : (1) melanjutkan kebijakan penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) sebelum tahun anggaran dimulai, (2) percepatan pelaksanaan kegiatan, (3) pelaksanaan lelang dini, (4) persiapan dokumen yang lebih baik. Upaya lain yang dilakukan adalah pemanfaatan *e-procurement*, pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan keuangan.

REALISASI BELANJA K/L PADA SEMESTER I TAHUN 2018 (s.d. 30 Juni 2018)

Sejalan dengan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yaitu “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”, dan tema kebijakan fiskal yaitu “**Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan**”, maka alokasi belanja K/L diarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif terutama belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan

perlindungan sosial dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L, Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui: (1) percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyederhanaan prosedur dan fleksibilitas pengadaan barang/jasa sehingga proses pencairan dana dapat diserap di awal tahun; (2) pelaksanaan reuvi atas DIPA dan rencana kegiatan, meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan, mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus; dan (3) mempercepat penyaluran dana bantuan sosial/bantuan pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Realisasi Belanja K/L pada Semester I Tahun 2018 mencapai Rp295,99 triliun atau 34,93 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017 mencapai Rp263,93 triliun

atau 33,05 persen dari alokasi pagu APBNP tahun 2017. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Belanja K/L pada periode tersebut antara lain : (1) kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan lelang dini untuk pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) percepatan pencairan program perlindungan sosial, antara lain Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bidik Misi; (3) pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR); dan (4) pelaksanaan beberapa agenda strategis antara lain Pilkada serentak dan persiapan Asian Games.

Realisasi belanja pegawai pada Semester I tahun 2018 sudah mencapai Rp103,77 triliun atau 45,62 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai pada periode yang sama tahun 2017 mencapai Rp93,56 triliun atau 41,84 persen dari alokasi pagu APBNP 2017. Peningkatan realisasi belanja pegawai tersebut disebabkan oleh antara lain : (1) pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan khusus guru nonPNS; dan (2) pembayaran THR bagi pensiunan.

Realisasi belanja barang pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp106,39 triliun atau 31,40 persen dari alokasi pagu APBN Tahun 2018, lebih tinggi dari pada periode yang sama tahun 2017 mencapai Rp97,13 triliun atau 32,84 persen dari alokasi pagu APBNP tahun 2017. Kinerja

percepatan penyerapan belanja barang tersebut utamanya untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan tindak lanjut hasil audit BPK sehingga terjadi perubahan pencatatan yang awalnya dari belanja modal menjadi belanja barang.

Realisasi belanja modal pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp40,75 triliun atau 19,99 persen dari alokasi pagu APBN 2018, mengalami penurunan dari realisasi belanja modal pada periode yang sama tahun 2017 mencapai Rp47,48 triliun atau 21,14 persen dari alokasi pagu APBNP tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan karena K/L masih menunggu pemberlakuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara penuh per 1 Juli 2018 terhitung sejak proses persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Selain itu, faktor lain yang menyebabkan realisasi belanja modal lebih rendah adalah belum tuntasnya pembebasan lahan karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah dengan masyarakat, dan pendanaan dari Pinjaman Luar Negeri masih belum efektif. Pada periode yang sama, realisasi belanja modal paling tinggi terutama untuk pembangunan/perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan/perbaikan peralatan dan mesin.

Untuk realisasi K/L bidang prioritas infrastruktur pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp41,60 triliun atau 25,67 persen dari alokasi pagu APBN

Progres Kegiatan Prioritas/Utama Tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (S.d Juni 2018)

2018. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan memadai. Sedangkan untuk kegiatan K/L yang sudah dikontrakkan pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp169,30 triliun atau sebesar 83,13 persen dari pagu alokasi belanja

modal tahun 2018 sebesar Rp203,88 triliun. Meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat, perkembangan penyerapan anggaran tidak selalu sama dengan perkembangan fisiknya. Sebagai contoh, progres perkembangan fisik untuk Kementerian PUPERA lebih cepat daripada perkembangan keuangannya.

No.	UNIT ORGANISASI / KEGIATAN PRIORITAS	TARGET TAHUN 2018	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	PROGRES KEUANGAN	PROGRES FISIK
A DITJEN SUMBER DAYA AIR					
1	Bendungan	48 Bendungan	7.525,74	34,12%	34,85%
	a. Bendungan Baru	14 Bendungan	113,91	0,77%	0,96%
	b. Bendungan On Going	34 Bendungan	7.411,83	35,10%	35,29%
2	Embung	43 Buah	636,91	30,70%	31,23%
3	Air Baku	5,92m3/dt	3.569,45	35,80%	39,90%
4	Jaringan Irigasi	145.533 Ha	4.629,68	25,56%	27,94%
5	Sapras Pengendali Daya Rusak Air	221 Km	3.332,20	36,41%	41,76%
6	Pengendali Sedimen dan Lahar	31 Buah	233,86	45,28%	51,78%
B DITJEN BINA MARGA					
1	Pembangunan Jalan	811,49 km	6.539,14	18,92%	17,00%
2	Pembangunan Jembatan	9,708,91 km	3.631,69	16,06%	14,00%
3	Pembangunan Jalan Tol	33,05 km	1.946,06	49,41%	53,69%
4	Pembangunan Fly Over / Underpass	2,420,40 km	658,37	28,22%	46,43%
C DITJEN CIPTA KARYA					
1	Pembangunan SPAM	3.437 ltr/dt	3.252,00	25,90%	24,90%
2	Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.991 Ha	1.637,75	26,30%	25,24%
3	Sanitasi dan Persampahan	2.095.063 KK	2.807,02	24,00%	25,60%
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	401.622 m2	3.217,29	55,80%	47,60%
D DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN					
1	Pembangunan Rumah Susun	13.500 Unit	4.955,02	13,00%	12,19%
2	Pembangunan Rumah Khusus	5.000 Unit	730,03	14,36%	12,40%
3	Pembangunan Rumah Swadaya	250.000 Unit	3.259,16	26,22%	18,39%
JUMLAH			60.085,64		

Progres Kegiatan Prioritas/Utama Tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (S.d Juni 2018)

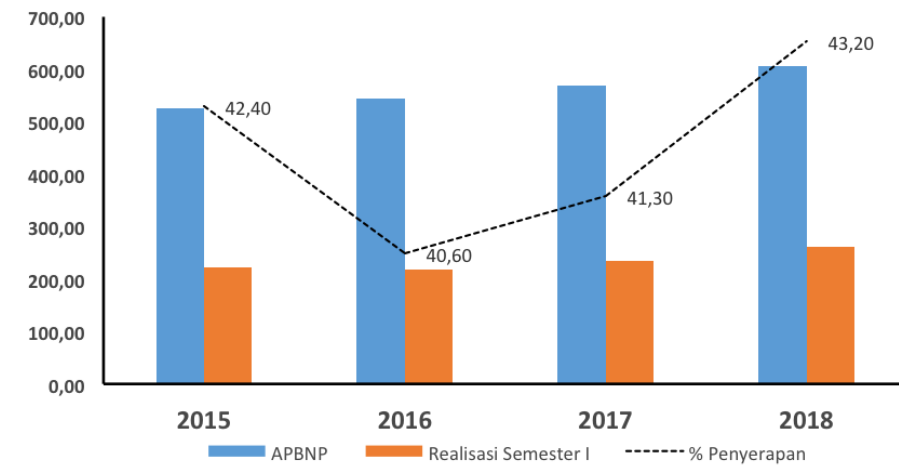
Realisasi 15 K/L dengan pagu terbesar pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp255,92 triliun atau 36,29 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 mencapai Rp233,64 triliun atau 34,54 persen dari alokasi pagu APBNP tahun 2017. Selanjutnya, terdapat 8 dari 15 K/L tersebut mempunyai kinerja penyerapan anggaran lebih tinggi antara lain: (1) Kementerian Pertahanan, (2) Kepolisian RI, (3) Kementerian Kesehatan, (4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (5) Kementerian Agama, (6) Kementerian Keuangan, (7) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan (8) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,82	39,29	34,22%	107,68	38,72	35,96%
2	KEMEN PU PERA	104,24	30,81	29,56%	107,39	29,07	27,07%
3	POLRI	98,22	30,93	31,49%	95,03	34,95	36,77%
4	KEMENAG	63,49	22,98	36,19%	62,15	23,01	37,03%
5	KEMENKES	55,86	22,99	41,15%	59,10	34,33	58,09%
6	KEMENHUB	44,64	12,38	27,72%	48,20	10,98	22,78%
7	KEMENKEU	40,54	18,49	45,60%	45,68	19,07	41,75%
8	KEMENDIKBUD	37,97	7,68	44,33%	40,09	14,86	35,99%
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	14,05	35,57%	41,28	15,42	37,35%
10	KEMENTAN	24,15	14,57	38,39%	23,82	15,32	38,22%
11	KEMENSOS	17,32	8,24	34,11%	41,30	6,35	26,65%
12	KEMENKUMHAM	11,21	3,56	31,74%	10,59	5,06	47,79%
13	KKP	9,14	3,57	43,69%	7,29	3,90	47,16%
14	MA	8,18	1,47	16,04%	8,26	2,27	31,18%
15	KEMENLU	7,17	2,65	36,93%	7,25	2,60	35,91%
15 K/L dengan Pagu Terbesar		676,43	233,64	34,54%	705,12	,92	36,29%
K/L Lainnya		122,16	30,29	24,80%	142,31	40,07	28,16%
JUMLAH		798,59	263,93	33,05%	847,44	295,99	34,93%

Realisasi Belanja NonK/L pada Semester I Tahun 2018

Realisasi belanja NonK/L pada Semester I tahun 2018 mencapai Rp262,45 triliun atau 43,23 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018. Realisasi belanja NonK/L tersebut yang utamanya antara lain untuk (1) pembayaran bunga utang yang mencapai Rp120,61 triliun atau 50,5 persen dari alokasi pagu APBN

tahun 2018. Meningkatnya realisasi pembayaran bunga utang sebagai dampak meningkatnya outstanding utang, kenaikan tingkat bunga obligasi negara, dan melemahnya nilai tukar rupiah. (2) pengelolaan program subsidi yang mencapai Rp73,94 triliun atau 47,33 persen dari alokasi pagu APBN tahun 2018. Meningkatnya realisasi pembayaran subsidi terutama subsidi energi sebagai dampak menguatnya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah atas kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sesuai hasil audit.



TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Dalam rangka mendorong pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, memperbaiki kualitas pelayanan dasar publik, maupun mengatasi ketimpangan kesejahteraan masyarakat antardaerah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun pada APBN tahun 2018. Dari jumlah pagu tersebut, realisasi penyaluran TKDD per 30 Juni 2018 mencapai Rp385,57 triliun (50,33 persen dari pagu TKDD), atau sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp394,76 triliun (51,51 persen dari pagu). Hal ini dipengaruhi baik oleh perkembangan realisasi Dana Perimbangan (terutama Dana Transfer Khusus atau DTK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Desa.

A. DANA PERIMBANGAN

Dalam APBN tahun 2018, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun, terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp490,71 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89

triliun. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp338,64 triliun (50,05 persen dari pagu APBN tahun 2018), atau Rp10,73 triliun lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp349,38 triliun atau 51,49 persen dari pagu APBNP tahun 2017.

1. DANA TRANSFER UMUM

Sampai dengan 30 Juni 2018, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) mencapai Rp268,21 triliun, atau 54,66 persen dari pagu DTU yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Secara nominal, capaian ini lebih rendah Rp14,63 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp282,84 triliun atau 57,26 persen dari pagu APBNP tahun 2017. Hal ini terutama dipengaruhi oleh realisasi penyaluran DBH yang lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sampai dengan 30 Juni 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp233,96 triliun, lebih tinggi sebesar Rp0,77 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode

yang sama tahun 2017 sebesar Rp233,19 triliun. Penyaluran DAU periode ini telah memperhitungkan penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada BPJS terhadap 11 pemerintah daerah sebesar Rp19,00 miliar. Secara umum DAU yang telah ditransfer mampu menjaga keseimbangan pelayanan dasar publik antardaerah.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada APBN tahun 2018, pagu DBH ditetapkan sebesar Rp89,23 triliun, atau Rp6,15 triliun lebih kecil bila dibandingkan pagu pada tahun sebelumnya sebesar Rp95,38 triliun. Hingga 30 Juni 2018, realisasi penyaluran DBH mencapai sebesar Rp34,25 triliun, atau 38,39 persen dari pagu APBN tahun 2018. Jumlah ini, berarti lebih rendah Rp15,40 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp49,65 triliun. Penurunan penyaluran DBH di triwulan II tahun 2018 sebesar 13,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017, disebabkan:

- Pada awal tahun 2017, terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH tahun 2015 sebesar sebesar Rp10,90 triliun yang disalurkan

pada bulan Februari; dan

- Perubahan pola Penyaluran DBH di Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2018, yang semula sebesar 25% dari pagu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/PMK.07/2017, diubah menjadi sebesar 20% dari pagu, sebagaimana diatur dalam PMK 112/PMK.07/2017. Tujuan dari penurunan besaran penyaluran pada triwulan I dan triwulan II tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi terjadinya Kurang Bayar dan/ atau Lebih Bayar DBH yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

2. DANA TRANSFER KHUSUS

Dalam APBN tahun 2018, Dana Transfer Khusus (DTK) dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun, dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp70,44 triliun, atau 37,89 persen dari pagu APBN tahun 2018, yang berarti Rp3,8 triliun lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasinya periode yang sama tahun sebelumnya

yang mencapai Rp66,54 triliun atau 36,04 persen dari pagu APBN tahun 2017. Tingginya penyerapan lebih disebabkan oleh realisasi penyaluran DAK Nonfisik, sedangkan untuk DAK Fisik realisasi penyalurannya lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dalam APBN tahun 2018, pagu anggaran DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp62,44 triliun. Sampai dengan 30 Juni 2018, realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp7,76 triliun, atau 12,43 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp4,05 triliun, DAK Penugasan Rp3,15 triliun, dan DAK Afirmasi sebesar Rp559,89 miliar. Realisasi DAK Fisik per 30 Juni 2018 tersebut lebih rendah Rp9,68 triliun apabila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp17,45 triliun, atau 25,09 persen dari pagu. Realisasi penyaluran DAK Fisik tahun 2018 yang lebih rendah dari tahun 2017 tersebut, karena adanya penyempurnaan ketentuan penyaluran yang diarahkan agar hasil-hasil dari pelaksanaan DAK Fisik bisa lebih sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal.

Penyempurnaan ketentuan penyaluran tersebut telah diatur dalam PMK No. 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sesuai PMK

tersebut, untuk dasar penyaluran DAK Fisik, daerah diminta menyampaikan ; (1) Perda APBD, (2) Laporan Pelaksanaan Tahun sebelumnya, dan (3) daftar Rencana Kegiatan dan daftar Kontrak DAK Fisik sebagai persyaratan untuk penyaluran tahap pertama. Ketentuan mewajibkan daerah menyampaikan daftar Rencana Kegiatan dan daftar Kontrak tersebut dimaksudkan untuk : (1) memastikan daerah sudah melakukan proses kontrak pekerjaan sebelum mengajukan penyaluran DAK Fisik, (2) memastikan agar pelaksanaan DAK Fisik sesuai dengan rencana yang disiapkan oleh daerah, (3) memastikan agar target output per bidang dapat dicapai, dan (4) mempermudah sistem monitoring pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah. Untuk mendorong percepatan realisasi DAK Fisik telah dilakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi, penyampaian surat kepada pemerintah daerah, pelatihan maupun SMS *Blast* kepada seluruh daerah dan K/L pengampu DAK Fisik.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dalam APBN tahun 2018 alokasi anggaran DAK Nonfisik ditetapkan sebesar Rp123,45 triliun. Hingga tanggal 30 Juni 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp62,67 triliun, atau 50,77 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan pada APBN 2018. Jumlah ini,

berarti Rp13,58 triliun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp49,09 triliun, atau 42,65 persen dari pagu.

Pada tahun 2018 juga telah dilakukan perbaikan penyaluran DAK Non Fisik. Apabila tahun 2017 penyaluran DAK Nonfisik berupa Dana Pelayanan Administratif Kependudukan (Admindak), dan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) disalurkan secara sekaligus, atau sesuai besaran persentase tertentu yang ditetapkan per triwulan, maka pada tahun 2018 penyaluran kedua jenis dana tersebut dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, sehingga penyaluran hanya dilaksanakan bagi daerah yang telah memenuhi kinerja penyerapan dan persyaratan pelaporan.

Untuk meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik, yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rekonsiliasi data, pemberitahuan melalui surat kepada daerah, dan kegiatan lainnya.

B. DANA INSENTIF DAERAH

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan suatu bentuk *reward* yang bertujuan untuk memotivasi dan memacu pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan

keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pada APBN tahun 2018, anggaran pagu DID ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun, atau naik Rp1,00 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran DID tahun 2017.

Realisasi penyaluran DID per 30 Juni 2018 mencapai Rp4,25 triliun atau 50,00 persen dari pagu alokasi, menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp4,49 triliun, atau 59,80 persen dari pagu alokasinya. Lebih rendahnya realisasi penyaluran DID tersebut disebabkan karena perbaikan pola penyaluran. Pada tahun sebelumnya (tahun 2017), penyaluran DID dibedakan untuk: (1) daerah yang hanya mendapatkan DID sebesar alokasi minimum, dananya disalurkan sekaligus, dan (2) daerah yang mendapatkan alokasi minimum dan alokasi kinerja, atau daerah yang mendapatkan alokasi kinerja, dananya disalurkan dalam 2 tahap, masing-masing tahap sebesar 50%. Sementara pada tahun 2018, tidak ada lagi alokasi minimum, sehingga semua daerah yang mendapatkan alokasi DID, dananya disalurkan dalam 2 tahap masing-masing sebesar 50 persen dari alokasi.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebagai wujud nyata pelaksanaan desentralisasi asimetris, bagi Provinsi Papua, Papua Barat,

dan Aceh. Dalam APBN tahun 2018, pagu anggaran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun, atau naik Rp0,62 triliun dari pagu anggaran Dana Otsus tahun 2017 sebesar Rp19,44 triliun.

Sampai dengan 30 Juni 2018, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur mencapai Rp6,02 triliun atau 30 persen dari pagu, yang berarti Rp0,15 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,86 triliun.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan keistimewaan, sampai dengan 30 Juni 2018, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp0,8 triliun, atau 80 persen dari pagu anggaran Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,00 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp0,16 triliun bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,64 triliun, atau 80,0 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY tahun 2017 sebesar Rp0,80 triliun.

D. DANA DESA

Dalam APBN 2018, pagu Dana Desa ditetapkan sebesar Rp60,00 triliun. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, realisasi penyaluran Dana Desa dari

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai Rp35,86 triliun, atau 59,77 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp1,46 triliun apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp34,40 triliun, atau 57,32 persen dari pagu alokasi.

Kinerja penyaluran Dana Desa yang lebih baik pada semester I tahun 2018 tersebut, antara lain karena adanya perbaikan ketentuan batas penyaluran Tahap I dan Tahap II yang sebelumnya paling lambat bulan Juli menjadi paling lambat bulan Juni sehingga mendorong percepatan pelaksanaan Dana Desa di desa. Selain itu, membaiknya kinerja penyaluran Dana Desa tahun 2018 tersebut karena adanya upaya yang intensif yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, melalui :

- Penyampaian surat pemberitahuan kepada seluruh bupati/wali kota mengenai langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan mulai bulan Januari;
- Kegiatan diseminasi Dana Desa yang juga mengundang Kepala Desa;
- Workshop regional percepatan penyaluran Dana Desa TA 2018 di 3 (tiga) wilayah regional (Kota

- Batam, Kota Surabaya, dan Kota Makassar) yang mengundang 434 daerah penerima Dana Desa;
- Relaksasi pengaturan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap I, yaitu bagi desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) APBDesa namun belum memenuhi minimal 30 persen Hari Orang Kerja (HOK), maka dapat mengajukan pencairan Dana Desa tahap I dengan menyampaikan

- Perdes APBDesa yang sudah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian APBDesa dengan memenuhi minimal 30 persen HOK pada saat pengajuan pencairan tahap II atau tahap III. Pemenuhan 30 persen HOK dimaksud tidak didasarkan per kegiatan, namun dihitung secara akumulasi dari keseluruhan nilai kegiatan di bidang pembangunan desa;
- Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, di mana perubahan APBDesa yang diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan dapat dilakukan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang dapat ditampung dalam APBDes Perubahan.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (YoY)
Tanggal : 1 Januari s.d. 30 Juni 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.339,32	394.758,20	51,51	766.162,58	385.573,55	50,33
Transfer ke Daerah	706.339,32	360.363,70	51,02	706.162,59	349.712,86	49,52
A. Dana Perimbangan	678.596,03	349.375,20	51,49	676.602,99	338.644,99	50,05
1. Dana Transfer Umum	493.959,53	282.835,30	57,26	490.714,92	268.208,51	54,66
a. Dana Bagi Hasil	95.377,22	49.650,00	52,06	89.225,34	34.252,73	38,39
b. Dana Alokasi Umum	398.582,31	233.185,30	58,50	401.489,58	233.955,78	58,27
2. Dana Transfer Khusus	184.636,50	66.539,90	36,04	185.888,07	70.436,48	37,89
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,50	17.445,20	25,09	62.436,26	7.761,81	12,43
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,00	49.094,70	42,65	123.451,81	62.674,67	50,77
B. Dana Insentif Daerah	7.500,00	4.485,00	59,80	8.500,00	4.250,00	50,00
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,29	6.503,60	32,13	21.059,60	6.817,87	32,37
1. Dana Otsus	19.443,29	5.863,60	30,16	20.059,58	6.017,87	30,00
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7.971,65	2.406,80	30,19	8.029,80	2.408,94	30,00
b. Provinsi Aceh	7.971,65	2.406,80	30,19	8.029,80	2.408,94	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3.500,00	1.050,00	30,00	4.000,00	1.200,00	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800,00	640,00	80,00	1.000,00	800,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	34.394,40	57,32	60.000,00	35.860,67	59,77

PEMBIAYAAN UTANG

Dengan Pengelolaan Yang Pruden dan Akuntabel, Utang Pemerintah Masih Dalam Level Aman Pada 29,79 persen.

	APBN 2018	Realisasi		% Growth (yoy)
		Juni 2018	% APBN	
Pembiayaan Utang	399,22	176,00	44,09%	-15,28%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	414,52	192,60	46,46%	-16,88%
2. Pinjaman (Neto)	(15,30)	(16,58)	108,47%	57,56%
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3,14	(0,51)	-16,35%	150,56%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,50	0,00	0,00%	-100,00%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1,37)	(0,51)	37,66%	77,86%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(18,44)	(16,08)	87,23%	54,90%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51,35	19,54	38,07%	-9,02%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69,79)	(35,63)	51,06%	11,81%

Realisasi pembiayaan utang pada Semester I tahun 2018 telah mencapai Rp176,00 triliun atau sebesar 44,09 persen dari target APBN tahun 2018. Secara detail, target pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan Surat Berharga Negara (Neto) untuk APBN tahun 2018 yang sebesar Rp414,52 triliun. Hingga Semester I tahun 2018 penerbitan Surat Berharga Negara telah mencapai mencapai Rp192,60 triliun atau 46,46 persen.

Realisasi Pinjaman (Neto) pada Semester I tahun 2018 sebesar negatif Rp16,58 triliun. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) yang terealisasi sebesar negatif Rp513,00 miliar yang seluruhnya merupakan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Sementara itu penarikan Pinjaman Dalam Negeri belum dilakukan hingga akhir Semester I tahun 2018.

Target Pinjaman Luar Negeri (Neto)

pada APBN 2018 sebesar negatif Rp18,44 triliun dan terealisasi hingga akhir bulan Juni 2018 sebesar negatif Rp16,08 triliun. Pada bulan Juni ini telah ditarik Pinjaman Luar Negeri (Bruto) sebesar Rp19,54 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp51,35 triliun. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri terealisasi sebesar Rp35,63 triliun dari Rp69,79 triliun seperti yang ditetapkan pada APBN tahun 2018

Pertumbuhan pembiayaan utang menunjukkan tren yang menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yaitu turun sebesar 15,28 persen (yoy). Pembiayaan Surat Berharga Negara mengalami tren penurunan sebesar 16,88 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Sementara itu, pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri mengalami pertumbuhan 77,86 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Tren penurunan juga terjadi pada Penarikan Pinjaman Luar Negeri

(Bruto) dimana terdapat penurunan sebesar 9,02 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Namun, pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri mengalami pertumbuhan sebesar 11,81 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Hingga akhir Semester I tahun 2018, pembiayaan APBN melalui Surat Utang Negara masih sejalan dengan target APBN dan masih dalam kondisi aman. Amannya pembiayaan APBN sampai dengan saat ini karena Pemerintah telah menyiapkan strategi *front loading* (penarikan pembiayaan di awal tahun). Selain itu Pemerintah juga telah menyiapkan opsi sumber pembiayaan utang lainnya seperti pinjaman program dan *private placement* untuk menjaga agar APBN tetap aman. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga APBN yang kredibel melalui pengelolaan pembiayaan yang pruden dan akuntabel.

(dalam Triliun Rupiah)

	Nominal	Growth (yoy)	%
	Juni-18		
Total Utang Pemerintah Pusat	4.227,78	14,06%	100,00%
a. Pinjaman	785,13	7,99%	18,57%
1. Pinjaman Luar Negeri	779,81	8,03%	18,44%
Bilateral	324,76	4,45%	7,68%
Multilateral	409,89	11,59%	9,70%
Komersial	43,81	2,51%	1,04%
Suppliers	1,34	57,46%	0,03%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,33	2,82%	0,13%
b. Surat Berharga Negara	3.442,64	15,54%	81,48%
1. Denominasi Rupiah	2.419,67	10,62%	57,27%
Surat Utang Negara	2.028,67	9,61%	48,01%
Surat Berharga Syariah Negara	391,00	16,12%	9,25%
2. Denominasi Valas	1.022,97	29,15%	24,21%
Surat Utang Negara	799,71	27,84%	18,93%
Surat Berharga Syariah Negara	223,26	34,10%	5,28%
Pendapatan Domestik Bruto**	14.193,50		
Rasio Utang thd PDB	29,79%		

** Asumsi PDB hingga Juni 2018

Hingga akhir Juni 2018, Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan Rp14.193,50 triliun. Dengan jumlah PDB tersebut, rasio utang Pemerintah per akhir Juni tetap terjaga di bawah 30 persen atau sebesar 29,79 persen. Persentase tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

Dari segi komposisi utang, Pinjaman Pemerintah yang berasal dari kreditur Bilateral dan Pinjaman Dalam Negeri mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,45 persen dan 2,82 persen, dimana pada akhir Juni tahun 2017 outstanding utang pemerintah dari kreditur Bilateral dan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp324,76 triliun dan Rp5,33 triliun sementara pada bulan yang sama di tahun 2018.

Pertumbuhan Pinjaman Luar Negeri bulan Juni 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan tahunan untuk SBN adalah sebesar 15,54 persen (yoy). Sementara itu, hingga bulan Juni 2018 SUN Domestik yang telah diterbitkan

Pemerintah sebesar Rp2.419,67 triliun dan untuk SUN dalam Valuta Asing telah diterbitkan sebesar Rp1.022,97 triliun.

Pemerintah mempunyai tujuan dan berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Indonesia lewat penerbitan Surat Berharga Negara serta mengurangi ketergantungan terhadap Pinjaman Luar Negeri. Untuk itu, peran Pinjaman sebagai sumber pembiayaan semakin mengecil namun instrumen ini tetap dilakukan sebagai pelengkap karena adanya beberapa benefit tambahan yang dapat diperoleh seperti transfer pengetahuan dan teknologi dari kreditur. Hal ini terutama diperoleh dari lembaga Multilateral yang memiliki program pembangunan secara global, serta menerapkan disiplin pengelolaan pendanaan yang mempengaruhi pengelolaan keuangan negara peminjam menjadi lebih baik.

Keseimbangan Primer Dan Pengelolaan Utang

Keseimbangan Primer menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menutup belanja diluar biaya bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Definisi keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Jadi apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah dapat membayar bunga utang dengan pendapatan negara. Sementara apabila keseimbangan primer negatif, maka berlaku hal yang sebaliknya.

Hingga akhir Juni 2018, keseimbangan primer tercatat positif Rp10,045 triliun atau 0,01 persen terhadap PDB yang artinya pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang dari pendapatan negara yang dihasilkan selama Semester I tahun 2018. Target keseimbangan primer pada APBN tahun 2018 ditetapkan defisit Rp87,33 triliun atau negatif 0,59 persen terhadap PDB, yang mana baru bisa diperhitungkan

apabila tahun anggaran telah berakhir.

Sebagai pertanggungjawaban Pemerintah dalam transparansi pengelolaan keuangan negara, setiap bulan dimonitor perkembangan keseimbangan primer. Setiap bulannya angka keseimbangan primer akan mengalami perkembangan baik positif maupun negatif. Angka tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam strategi pembiayaan APBN. Namun, angka keseimbangan primer yang dirilis pemerintah setiap bulannya belum menjadi posisi akhir keseimbangan primer. Namun, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa terdapat transparansi dalam setiap kebijakan pembiayaan APBN.

Kedepan, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai Keseimbangan Primer yang positif. Apa yang terjadi saat ini merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut melalui pengelolaan APBN yang semakin kredibel dan prudent.

Peran Strategis BMN Dalam Mendukung APBN

Pencanangan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 tahun lalu oleh Menteri Keuangan, menjadi tanda dimulainya kegiatan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018. BMN yang direvaluasi mencakup 902.569 item barang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Kegiatan revaluasi BMN ini dilaksanakan sebagai kelanjutan dari kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN sebelas tahun yang lalu, hal ini dilakukan karena nilai BMN dapat berubah seiring dengan perubahan faktor-faktor pembentuk nilai aset seperti lokasi, usia ekonomis dan lain-lain. Selain itu kegiatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti amanat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI pada tanggal 23 Mei 2016 lalu, di mana Kementerian Keuangan diminta untuk melakukan revaluasi aset terhadap BMN yang akan digunakan kembali (*roll over*) sebagai dasar penerbitan *underlying asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Salah satu program pemerintah yang dituangkan dalam Nota Keuangan 2018 adalah mendorong penerbitan

SBSN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah mendapat tantangan untuk bisa menambah sumber pembiayaan yang berasal dari SBSN.

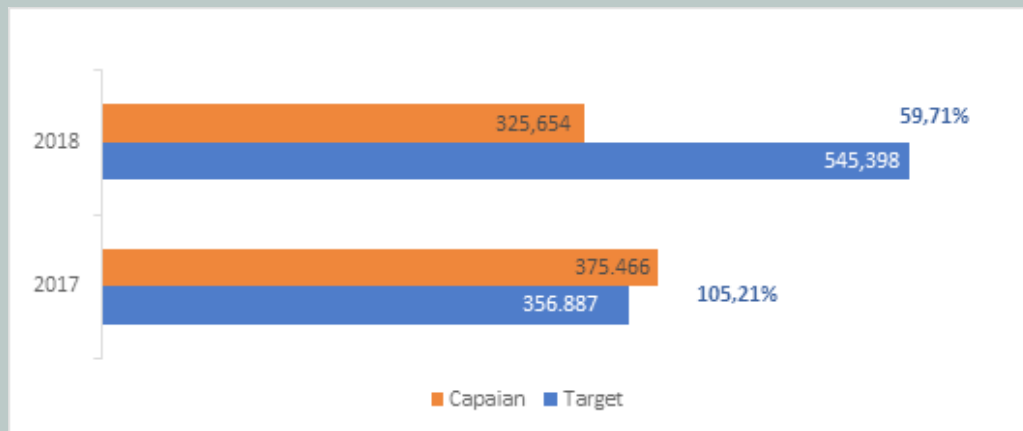
Revaluasi BMN adalah kerja bersama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang dengan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai Pengguna Barang. Pelaksanaan program berskala nasional ini direncanakan untuk dapat diselesaikan selama dua tahun yaitu dengan melakukan penilaian terhadap aset berupa tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan air. Dalam revaluasi BMN ini, metode penilaian yang digunakan adalah *full valuation* dan *desktop valuation*. Untuk nilai hasil revaluasi BMN tahun 2017 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan saran agar hasil revaluasi disajikan ke LKPP setelah semua kegiatan revaluasi BMN selesai di tahun 2018. Dengan kata lain, untuk LKPP tahun 2017 BPK ingin Pemerintah tetap menyajikan angka historis dan baru menyajikan hasil revaluasi BMN 2017-2018 pada LKPP 2018.

Adapun tujuan pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017 dan 2018 ini antara lain (1) memperoleh nilai aset tetap yang *updated* dalam laporan keuangan, (2) membangun *database* BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari, (3) mengidentifikasi BMN *idle* dan (4) meningkatkan *leverage* BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan SBSN.

Nilai Aset Tetap Yang Updated Pada LKPP

Revaluasi BMN pada tahun 2017 telah selesai dilaksanakan dengan capaian yang telah melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data per 6 Juli 2018 secara rinci disampaikan sebagai berikut:

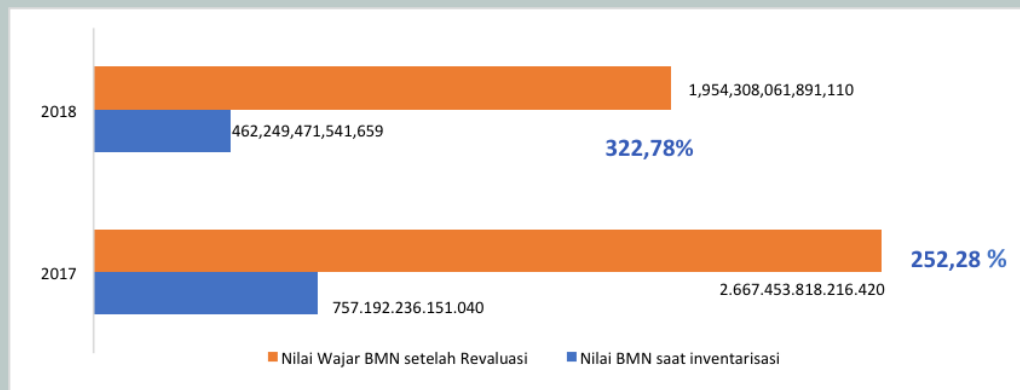
Grafik 1, Penyelesaian NUP revaluasi BMN tahun 2017-2018



(Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/monreval>, per 6 Juli 2018)

Sementara itu, revaluasi BMN pada tahun 2018 saat ini masih dalam proses pelaksanaan, dimana hingga per 6 Juli 2018 menghasilkan capaian sebagai berikut:

Grafik 2, Nilai BMN sebelum dan sesudah revaluasi BMN tahun 2017-2018



(Sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/monreval>, per 6 Juli 2018)

Membangun Database Yang Lebih Baik Untuk Pengelolaan BMN

Revaluasi BMN juga menjadi jalan bagi DJKN untuk membangun *database* yang mengadopsi Sistem Informasi Geografis (SIG atau *Geographic Information System* disingkat GIS). SIG secara umum adalah sistem informasi yang dibuat khusus yang mengelola data dan informasi spasial (berreferensi ke-ruangan). Dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah *database*. Selain itu, melalui hasil revaluasi juga dapat diperoleh data dan informasi lain terkait status penggunaan dan status sengketa BMN. Data dan informasi terkait BMN tersebut per 6 Juli 2018 antara lain sebagai berikut:

Tabel 1, Status Penggunaan BMN

Uraian	Jumlah Item (NUP)	Nilai Buku (Dalam Miliar Rupiah)	Nilai Wajar Hasil Revaluasi (Dalam Miliar Rupiah)
BMN Idle	260	53,56	487,26
BMN Yang Digunakan Oleh Satker Lain Dalam Satu K/L	55	449,05	1.529,12
BMN Yang Digunakan Oleh Satker Lain di Luar K/L	31	59,90	222,23
Digunakan Sendiri Untuk Dinas Jabatan	2.864	494,39	3.043,38
Digunakan Sendiri Untuk Operasional	245.969	439.184,29	1.705.087,90

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, per 6 Juli 2018

Tabel 2, Status Sengketa BMN

Uraian	Jumlah Item (NUP)	Nilai Buku (Dalam Miliar Rupiah)	Nilai Wajar Hasil Revaluasi (Dalam Miliar Rupiah)
BMN Sengketa Non Pengadilan	168	5.271,98	29.063,62
BMN Sengketa Pengadilan	44	3.275,44	4.522,68
BMN Tidak Sengketa	304.584	462.249,47	1.823.173,23

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, per 6 Juli 2018

Data dan informasi pada tabel di atas khususnya terkait status penggunaan

BMN akan dibutuhkan oleh DJKN yang berperan sebagai manajer aset untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan BMN yaitu Penetapan Status Penggunaan (PSP), Alih Status Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN. Sementara itu, data dan informasi terkait status sengketa BMN dibutuhkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan langkah-langkah Pengamanan BMN meliputi Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.

Selama ini data BMN yang ada di Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) adalah data yang berasal dari Pengguna Barang. Disadari atau tidak, data yang selama ini dikelola belum *update* dan akurat. Hal ini diantaranya disebabkan karena satker K/L saat menginput data awal (pertama kali) BMN berupa tanah di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN terkadang tidak lengkap dan akurat. Selain itu ketika ada pemekaran wilayah di propinsi atau kabupaten tertentu, belum tentu satker *update* alamat secara lengkap sesuai dengan kondisi terkini. Untuk BMN berupa tanah/bangunan, alamat yang lengkap yang disertai dengan koordinat lokasi akan sangat mendukung *database* yang handal dan akurat.

Dalam metode *full valuation*, tim Penilai DJKN meninjau langsung tanah BMN yang menjadi obyek revaluasi. Dalam kesempatan

tersebut, *tagging* koordinat BMN berupa tanah dapat langsung dilakukan dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Penilaian (SIP). Sistem Informasi Penilaian menjadi alat bantu kegiatan penilaian yang berbasis *web* dan sudah menggunakan *geo-tagging*, yaitu identifikasi geografis metadata untuk berbagai media seperti photo, video, *website*, atau *RSS feed* dan merupakan bentuk metadata geospasial.

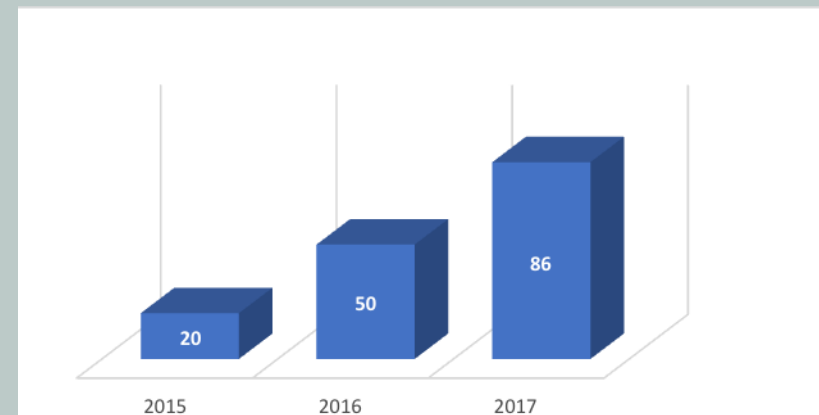
Database BMN yang akurat dan dapat diakses oleh pimpinan DJKN dari mana saja (*mobile*) sangat membantu dalam percepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN.

Mengidentifikasi BMN *Idle*

Revaluasi BMN 2017-2018 kali ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi BMN yang *idle*. Kriteria BMN *idle* menurut PMK 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga meliputi (a) BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan atau; (b) BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud apabila BMN telah direncanakan untuk digunakan oleh K/L yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun kedua atau BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan dalam waktu 1 (satu) tahun, sejak BMN terindikasi *idle*.

Dalam melakukan penelaahan Rencana Kerja BMN (RKBMN) Pengelola Barang menggunakan *database* yang dimiliki atas ketersediaan aset dari satker itu sendiri dan sekaligus juga memperhatikan data BMN *idle* yang ada pada Pengelola Barang serta memperhatikan Standar Biaya, Standar Kebutuhan dan Standar Barang. Mekanisme pengadaan BMN khususnya berupa tanah dan/atau bangunan diprioritaskan bersumber dari aset *idle* yang ada pada Pengelola Barang, kemudian jika tidak ada aset *idle* yang dapat digunakan, maka opsinya adalah mekanisme pengadaan melalui penyediaan anggaran.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL), baik RKBMN Pengadaan maupun RKBMN Pemeliharaan telah diimplementasikan pada K/L pada kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Hal ini dapat dilihat melalui tampilan diagram berikut :



Grafik 4, Jumlah K/L yang mengimplementasikan RK-BMN 2015-2017

(Sumber: Direktorat BMN, 2018)

RKBMN yang telah disetujui oleh DJKN menjadi dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam penyusunan RKAKL terkait biaya pemeliharaan dan pengadaan BMN dengan kriteria khusus.

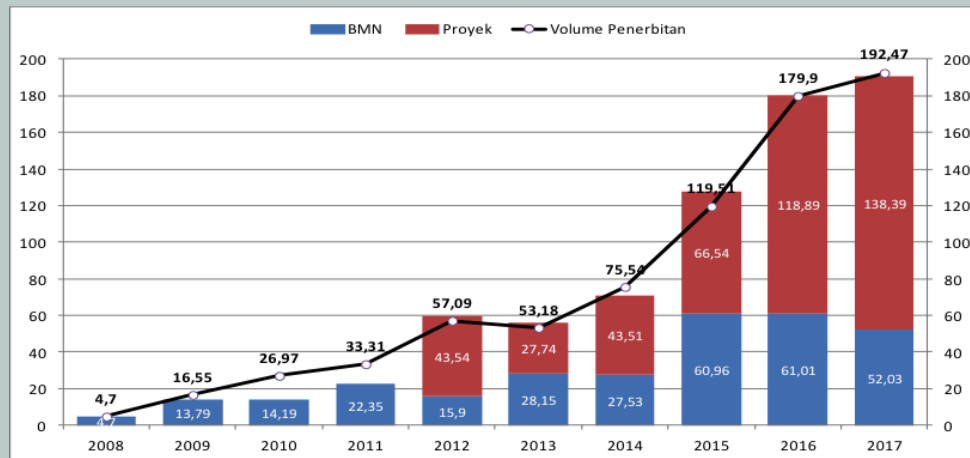
BMN sebagai *underlying asset* SBSN

Nilai BMN yang *update* akan berpengaruh signifikan sebagai *underlying asset* dalam pembiayaan APBN melalui SBSN. Adapun BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN dapat berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan

sebagai dasar penerbitan SBSN. Syarat BMN sebagai *underlying asset* SBSN sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 PMK Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara, antara lain: (1) memiliki nilai ekonomis, (2) dalam kondisi layak, (3) telah tercatat dalam dokumen penatausahaan BMN, (4) bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, (5) tidak sedang dalam sengketa, (6) tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN dan (7) bukan berasal dari wakaf.

Perkembangan nilai BMN yang ditetapkan sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN terus mengalami perkembangan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. *Trend* nilai BMN yang ditetapkan sebagai *underlying asset* dari tahun 2008 s.d tahun 2017 secara umum mengalami kenaikan sebagaimana disampaikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 5, *Underlying Asset* yang Digunakan Dalam Penerbitan SBSN Tahun 2008-2017



(Sumber: DJPPR, 2018)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2008-2017) hanya pada tahun 2012, tahun 2014, dan tahun 2017 BMN yang dijadikan *underlying asset* mengalami penurunan. Sementara itu, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 121 persen dimana pada tahun 2014 BMN yang dijadikan *underlying asset* sebesar Rp27,53 triliun, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp60,96 triliun. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 nilai total BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN adalah sebesar Rp300,61 triliun yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penetapan Aset SBSN. Selain itu, adanya program nasional revaluasi BMN pada tahun 2017 dan 2018 mampu mendorong penggunaan BMN sebagai *underlying asset* dalam rangka penerbitan SBSN secara lebih efisien.

BMN dan Peran Strategis Lainnya

BMN pada prinsipnya diadakan atau diperoleh untuk pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. Apabila

pelaksanaan tugas dan fungsi telah terpenuhi, namun BMN masih dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara maka inilah yang dikenal dengan istilah aset bekerja untuk Pemerintah (*sweating asset*) dan bukan sebaliknya. Penerimaan negara yang dihasilkan dari pengelolaan BMN antara lain hasil pelepasan BMN yang berlebih dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan (*idle*). Pemanfaatan BMN sebagai sumber penerimaan negara dapat dilakukan melalui mekanisme sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP), dan Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) maupun kerjasama penyediaan infrastruktur.

Tabel 3, Pendapatan Pengelolaan BMN Tahun 2013 s.d. 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan dari Penjualan Aset	189.384.228.119	136.462.179.080	97.435.483.632	141.430.367.495	199.483.171.389
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	291.228.758.879	293.342.385.777	370.388.404.382	343.438.059.926	503.010.142.868
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	33.556.178.476	2.477.501.155.958	205.196.034.429	565.461.847.332	612.917.602.747
Total	514.169.165.474	2.907.305.720.815	673.019.922.443	1.050.330.274.753	1.315.410.917.004

(sumber : LKPP tahun 2013 s.d. 2017, diolah)

Peran pengelolaan BMN yang juga signifikan adalah dari sisi pengeluaran melalui kegiatan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, dalam penghematan belanja modal, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Peran ini karena keterlibatan dalam penelaahan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) yang dibuat oleh K/L. Sejak awal, DJKN terlibat dalam menentukan secara andal biaya akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan aset agar sesuai antara kebutuhan dana dan penyediaan anggaran.

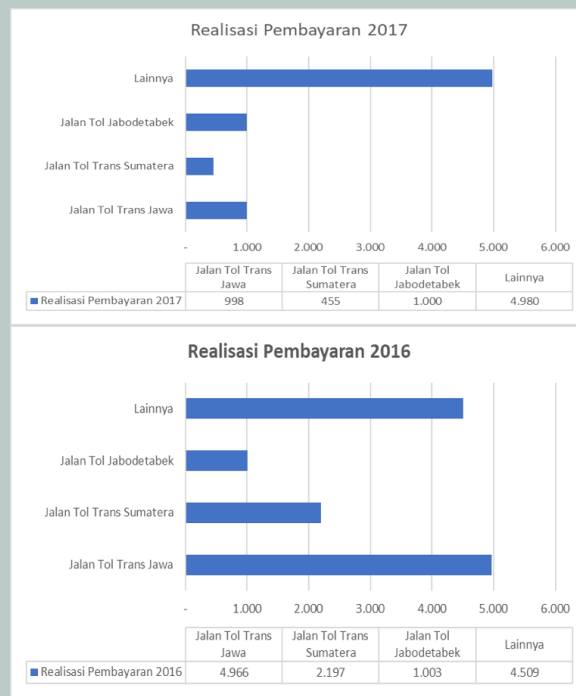
BMN yang termasuk *idle* yang telah diserahkan kepada pengelola barang sejak tahun 2016 diserahkan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), satker Badan Layanan Umum (BLU) di bawah DJKN, untuk dioptimalisasikan penggunaannya (*the highest and best use*). Didirikan sejak tahun 2016, mandat awal pendirian LMAN adalah sebagai Operator Pengelola Barang dalam meningkatkan optimalisasi aset Negara. Namun, dalam perjalanannya, LMAN diberikan peran lainnya yaitu untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2016, LMAN memperoleh alokasi anggaran pada APBNP Tahun 2016 sebanyak Rp16 triliun guna menekan inefisiensi pengadaan tanah maupun lahan dalam pembangunan infrastruktur. Pengadaan tanah itu bertujuan untuk mendukung proyek strategis nasional yang telah direncanakan oleh pemerintah. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan tanah pada 27 ruas jalan tol. Dari total alokasi anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp12,6 triliun.

Selanjutnya, pada tahun 2017, LMAN kembali mendapatkan alokasi anggaran pembebasan lahan, yaitu sebesar Rp32,05 triliun pada APBNP Tahun 2017. Alokasi anggaran tersebut ditujukan guna mendanai pengadaan tanah untuk 78 proyek yang meliputi 43 ruas Jalan Tol senilai Rp25,3 triliun, 6 proyek kereta api senilai Rp3,9 triliun, 28 proyek bendungan senilai Rp2,38 triliun dan satu proyek pelabuhan senilai Rp500 miliar.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, LMAN telah melakukan pembayaran sebesar Rp24.24 triliun untuk pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional. Berikut merupakan progres pencairan dana oleh LMAN 2016-2017:

Grafik 6, Realisasi Pencairan Dana Proyek Strategis Nasional oleh LMAN 2016-2017



Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengkajian terhadap *multiplier effect* atas pembangunan Jalan Tol pada Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Jalan Tol pada PSN memiliki dampak pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, efisiensi waktu tempuh dan biaya logistik, serta peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan.

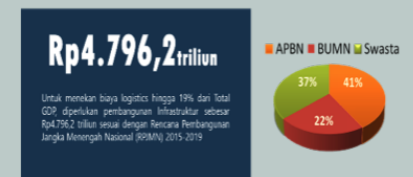
Ke depan, LMAN akan mengupayakan skema *leverage* atas BMN berupa tanah PSN guna memberikan kontribusi optimal dalam mendukung penerimaan negara maupun perkembangan ekonomi secara nasional.

Perencanaan Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur

Infrastruktur dalam KBBI didefinisikan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Peraturan Presiden No.38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam Pemerintah di Indonesia pada era Jokowi-Jusuf Kalla karena diyakini infrastruktur memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dalam World Development Report (1994) dijelaskan Negara dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan

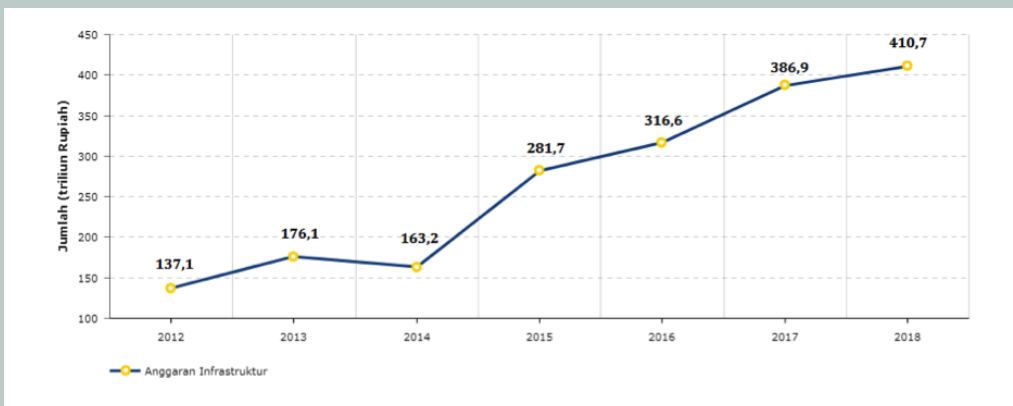
NEGARA	Peringkat	Indeks
Singapura	2	6.5
Jepang	5	6.3
Malaysia	24	5.4
Rusia	35	4.9
China	42	4.7
Thailand	49	4.4
INDONESIA	60	4.2
Afsel	64	4.2
India	68	4.0



konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki tantangan besar antara lain berupa ketersediaan kapasitas fiskal. Berdasarkan Data RPJMN Pemerintah RI tahun 2015-2019, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia sebesar Rp4.796,2 triliun. Kemampuan kapasitas APBN untuk memenuhi

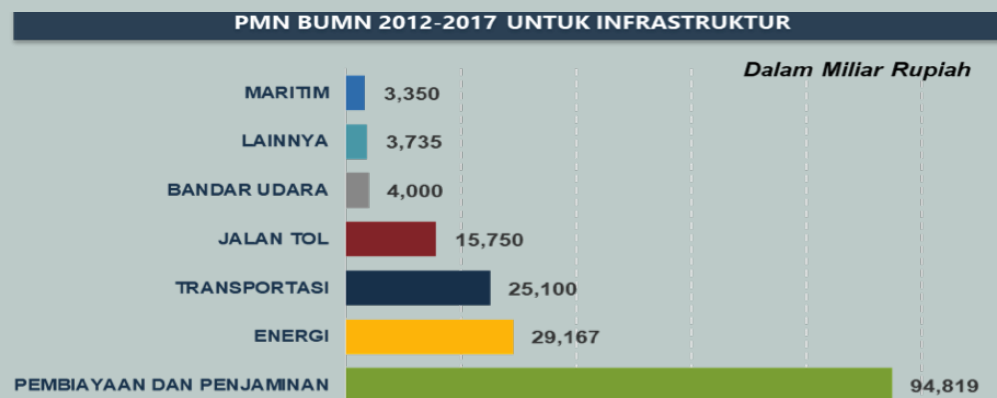
kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut diperkirakan hanya sebesar 41 persen atau Rp1.978,6 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan proyeksi belanja modal pemerintah yang di dalamnya termasuk infrastruktur, tahun 2015-2019 sebesar Rp1.338 triliun atau terdapat *gap* sebesar Rp 640,6 triliun.



Melihat proyeksi *Debt to GDP* Pemerintah yang sudah optimal untuk memenuhi target pembiayaan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah dapat memenuhi *gap* kebutuhan pembiayaan antara lain dengan realokasi belanja dan efisiensi belanja, serta pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pembiayaan infrastruktur melalui APBN dilaksanakan Pemerintah antara lain melalui penyertaan modal Negara (PMN) dan penugasan Pemerintah kepada BUMN dengan pemberian fasilitas fiskal (PMN, penjaminan, insentif). Salah satu contoh upaya Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah penugasan pemerintah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera kepada PT Hutama Karya (Persero) dan untuk pembangunan jalur *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan kepada PT Waskita Karya (Persero)

Dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk PMN yang meliputi berbagai sektor infrastruktur tampak dalam gambar di bawah ini:



Pemerintah juga berupaya mengatasi hambatan besar (*bottleneck*) dalam pembangunan infrastruktur yakni pengadaan tanah, dengan mendirikan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Skema pendanaan melalui LMAN diharapkan mampu memberikan percepatan pada pengadaan tanah untuk proyek jalan tol.

Pada tahun 2018, komitmen Pemerintah untuk melanjutkan pembiayaan infrastruktur terus berlanjut dengan melakukan peningkatan Investasi Pemerintah pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pengembangan UMKM, ekspor, dan perumahan. Dalam melaksanakan pembiayaan infrastruktur untuk tahun 2018, Pemerintah menggunakan strategi sebagai berikut:

- Percepatan realisasi pencairan BLU LMAN untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional.
- Pembiayaan ekspor pada komoditas unggulan melalui program *National Interest Account* (NIA).
- Prioritas PMN pada BUMN yang melaksanakan Program Prioritas Nasional.
- Mendukung program peningkatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tepat sasaran.

- Pembiayaan kreatif dan Inovatif untuk akselerasi pembangunan dan mencapai ekonomi inklusif melalui peningkatan akses pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara luas.
- Mendorong kontribusi BUMN dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan belanja modal BUMN dengan meningkatkan kapasitas *leverage* BUMN dan aksi korporasi lainnya.

Pemerintah menyadari peran strategis pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mempercepat pemerataan perekonomian di masyarakat. Pemerintah telah berupaya melakukan pembiayaan infrastruktur secara optimal, baik melalui pembiayaan langsung yang bersumber dari APBN maupun mendukung pembangunan infrastruktur dari sumber non APBN dengan mendorong partisipasi BUMN dan swasta melalui pelaksanaan skema KPBU.

Berbagai proyek infrastruktur telah dilaksanakan melalui skema KPBU misalnya proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda yang dijamin oleh PT PII. Adapun skema pembiayaan *direct lending* yang merupakan skema pinjaman dari lembaga keuangan multilateral langsung ke BUMN tanpa melalui mekanisme penerusan pinjaman (mekanisme APBN) telah dilaksanakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Demikian pula dengan Proyek Palapa Ring yang merupakan proyek KPBU pertama yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment* (AP) dimana Badan Usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur terlebih dulu untuk selanjutnya investasi tersebut akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia memerlukan komitmen dan upaya serius dari Pemerintah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan manfaat ekonomi dan manfaat sosial kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai perwujudan dari Nawa Cita.

Realisasi APBN s.d. 30 Juni 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018		
	APBN	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736.060,1	718.249,3	41,4%	1.894.720,4	833.448,2	44,0%
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.732.952,0	718.036,2	41,4%	1.893.523,5	830.327,9	43,9%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472.709,9	571.916,4	38,8%	1.618.095,5	653.495,2	40,4%
a. Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	554.551,2	38,6%	1.579.395,5	632.503,3	40,0%
b. Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	17.365,2	48,3%	38.700,0	20.991,9	54,2%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.242,1	146.119,8	56,1%	275.428,0	176.832,7	64,2%
II. HIBAH	3.108,1	213,2	6,9%	1.196,9	3.120,3	260,7%
B. BELANJA NEGARA	2.133.295,9	893.318,6	41,9%	2.220.657,0	944.008,7	42,5%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.366.956,6	498.560,5	36,5%	1.454.494,4	558.435,1	38,4%
1. Belanja K/L	798.585,3	263.934,9	33,1%	847.435,2	295.989,2	34,9%
2. Belanja Non /L	568.371,3	234.625,6	41,3%	607.059,2	262.445,9	43,2%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.339,3	394.758,2	51,5%	766.162,6	385.573,6	50,3%
1. Transfer ke Daerah	706.339,3	360.363,8	51,0%	706.162,6	349.712,9	49,5%
2. Dana Desa	60.000,0	34.394,4	57,3%	60.000,0	35.860,7	59,8%
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(178.039,4)	(68.245,4)	38,3%	(87.329,5)	10.045,0	-11,5%
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(397.235,8)	(175.069,3)		(325.936,6)	(110.560,5)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,92)	(1,29)		(2,19)	(0,74)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	397.235,8	209.360,7	52,7%	325.936,6	176.246,7	54,1%
I. PEMBIAYAAN UTANG	461.343,6	207.750,9	45,0%	399.219,4	176.001,8	44,1%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.733,8)	(125,0)	0,2%	(65.654,3)	(800,0)	1,2%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3.668,7)	1.547,9	-42,2%	(6.690,1)	946,6	-14,15%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	-	0,0%	(1.121,3)	-	0,0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300,0	186,9	62,3%	183,0	98,3	53,7%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	34.291,4		-	65.686,3	

Halaman Kosong



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA